

**ANALISIS PENGARUH PENERBITAN SURAT BERHARGA
SYARIAH NEGARA (SBSN) TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA TAHUN 2012-2021 DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

**AGUS SALIM
NPM. 1851010359**

Program Studi: Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**ANALISIS PENGARUH PENERBITAN SURAT BERHARGA
SYARIAH NEGARA (SBSN) TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA TAHUN 2012-2021 DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



Oleh:

AGUS SALIM

NPM. 1851010359

Program Studi: Ekonomi Syariah

Pembimbing I :Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I

Pembimbing II : Ersi Sisdianto, M.Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Pembangunan dapat dilihat dari adanya peningkatan produktivitas pelaku ekonomi yang biasanya diukur melalui pendapatan perkapita. Dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dibutuhkan peran strategis yaitu berupa pembentukan modal. 10 (sepuluh) tahun terakhir APBN Indonesia selalu mengalami *devisit* yang mana mengharuskan pemerintah melakukan belanja modal. Salah satu instrumen belanja modal yang dilakukan pemerintah adalah dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan harapan dapat menutup *devisit* dan melanjutkan pembangunan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap pembangunan ekonomi Indonesia tahun 2012-2021 menurut perspektif ekonomi syariah. Sedangkan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap pembangunan ekonomi Indonesia tahun 2012-2021 menurut perspektif ekonomi syariah

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier sederhana. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa data *time series* dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun yakni 2012-2021. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (X), dan variabel terikatnya adalah Pembangunan Ekonomi (Y).

Berdasarkan pada uji yang dilakukan menunjukkan bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi syariah penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam karena didasarkan untuk kesejahteraan masyarakat serta terhindar dari *gharar* (spekulasi), *maysir* (ketidakpastian), dan *riba* (bunga).

**Kata Kunci : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),
Pembangunan Ekonomi, Pendapatan Perkapita,
Ekonomi Syariah**

ABSTRACT

Development can be seen from an increase in the productivity of economic actors which is usually measured by per capita income. In increasing economic growth and development, a strategic role is needed in the form of capital formation. In the last 10 (ten) years, the Indonesian State Budget has always experienced a deficit, which requires the government to make capital expenditures. One of the capital expenditure instruments carried out by the government is the issuance of Government Islamic Securities (GIS) in the hope of closing the deficit and continuing development. The formulation of the problem in this study is how the effect of the issuance of Government Islamic Securities (GIS) on Indonesia's economic development in 2012-2021 according to the perspective of sharia economics. While the purpose of this study is to determine the effect of the issuance of Government Islamic Securities (GIS) on Indonesia's economic development in 2012-2021 according to the perspective of Islamic economics.

This research is a type of quantitative research using simple linear regression analysis method. The data used is secondary data in the form of time series data for a period of 10 (ten) years, namely 2012-2021. The independent variable in this study is Government Islamic Securities (GIS) (X), and the dependent variable is Economic Development (Y).

Based on the tests conducted, it shows that the Government Islamic Securities (GIS) has a positive and significant effect on economic development. In a sharia economic perspective, the issuance of Government Islamic Securities (GIS) in Indonesia is in accordance with Islamic economic principles because it is based on the welfare of the community and is protected from gharar (speculation), maisyir (uncertainty), and Riba (interest).

Keywords: *State Sharia Securities (SBSN), economic development, per capita income, Islamic economy*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Salim
NPM : 1851010359
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2012-2021 Dalam Prespektif Ekonomi Syariah”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 02 September 2022

Penulis,



Agus Salim
NPM.1851010359



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2012-2021 Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Nama : Agus Salim

NPM : 1851010359

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Mardiyah Hayati, S.P., M.S.I

NIP. 197605292008012010


Ersi Sisdiyanto, M.Ak

NIP. 198611102019031012

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. Eriko Anggraeni, M.E.Sy

NIP. 198208092011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Analisis Pengaruh Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2012-2021 Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**” disusun oleh **AGUS SALIM NPM.1851010359** Program **Studi Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 10 Oktober 2022.**

Tim Penguji

Ketua Sidang : **Dr. Asriani, S.H., M.H.** (.....)
Sekretaris : **Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek.** (.....)
Penguji I : **Dr.H. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.** (.....)
Penguji II : **Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I.** (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. H. Nur Hafid, M.M., Akt., CA.

2008011008

MOTTO

﴿... إِنَّ أَحْسَنَكُمْ لَأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, ..”

(QS. AL – ISRA’ [17] : 7)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah-Nya serta kesabaran dan kekuatan kepada penulis, tak lupa pula sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh syukur, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa cinta dan kasih, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Keluargaku, terkhusus kedua orang tua yang sangat saya cintai dan banggakan Bapak Palil dan ibu Indayatun, juga kepada kedua kakakku Rifa'i dan Muchlis yang selalu memberikan do'a yang tulus dan ikhlas serta memberikan banyak dukungan serta motivasinya sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya.
2. Pimpinan PT. Hasta Dwiyustama Bapak H. Yusirwan, S.E., M.H dan ibu Hj. Nurul Habibah, kepada seluruh jajaran karyawan PT. Rizka Tama Line, terkhusus kepada Bapak Wahyu Widodo dan Bapak Didih Wijiantoro, S.I.P selaku rekan satu devisi pada Stockpile Batu Bara HDY yang saya anggap seperti keluarga sendiri yang telah memberikan kesempatan serta dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
3. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang menjadi tempat saya menimba ilmu dan pengetahuan yang InsyaAllah bermanfaat bagi saya serta memberikan pengalaman berharga untuk saya sejak 2018.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama lengkap Agus Salim, dilahirkan di Lampung Timur pada tanggal 21 Agustus 1999. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Palil dan Ibu Indayatun.

Penulis memulai pendidikannya di TK. Pertiwi Braja Gemilang dan selesai pada tahun 2005, kemudian dilanjutkan pada jenjang Sekolah Dasar pada SD Negeri Braja Gemilang dan lulus pada tahun 2011, selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama pada Mts. Tahfiduzul Qur'an dan lulus tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas pada MA. Tahfidzul Qur'an dan lulus pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi dengan Prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan sehingga skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2012-2021 Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”** dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah satu-satunya Nabi yang bisa kita nantikan syafaat-Nya kelak di *yaumul akhir*.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Sati (S1) jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang turut berperan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dan berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt, C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I selaku pembimbing akademik I yang telah menyediakan waktu dan memberikan masukan-masukan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ersi Sisdianto, M.Ak selaku Pembimbing akademik II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan saran serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan pengetahuan yang sangat

bermanfaat dan segenap bantuan selama proses menyelesaikan studi.

6. Kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan atas bantuan dalam penyediaan data dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat paguyuban HDY Kostel tersayang yang selalu menemani selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat seperjuangan khususnya seluruh anggota kelas F Ekonomi Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini serta menjadi wadah keluh kesah dan canda tawa sejak tahun 2018.
9. Seluruh karyawan pada lingkungan Stockpile Batu Bara PT. Hasta Dwiyustama, beserta Ibu kantin yang selalu menyemangati dan mendukung proses skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penulis berharap sekiranya pembaca adapat memberikan kritik dan saran bagi penulis, penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi sumbangsih dalam pemngembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ekonomi syariah.

Dengan mengucapkan banyak terimakasih, semoga jasa-jasa Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pihak yang telah terlibat yang telah membantu dan mendo'akan penulis hingga skripsi ini terselesaikan mendapatkan balasan pahala dan keberkahan berlipat ganda dari Allah SWT.

Amien YaRabbal'alamien

Bandar Lampung, 02 September 2022
Penulis,

Agus Salim
NPM.1851010359

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 2 |
| C. Identifikasi Dan Batasan Masalah..... | 11 |
| D. Rumusan Masalah | 12 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 13 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan | 14 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 32 |

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

| | |
|---|----|
| A. <i>Grand Theory</i> | 35 |
| 1. Teori Harrod-Domar | 35 |
| 2. Teori Adam Smith | 37 |
| B. Konsep Pembangunan Ekonomi..... | 39 |
| 1. Pengertian Pembangunan Ekonomi | 39 |
| 2. Indikator Pembangunan Ekonomi | 40 |
| 3. Modal Dalam Pembangunan Ekonomi | 44 |
| C. Sukuk | 47 |
| 1. Pengertian Sukuk | 47 |
| 2. Dasar Hukum Sukuk..... | 47 |
| 3. Jenis-Jenis Sukuk..... | 50 |
| D. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)..... | 52 |
| 1. Pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)..... | 52 |

| | |
|--|----|
| 2. Dasar Hukum Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)..... | 54 |
| 3. Akad Dalam Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)..... | 54 |
| 4. Jenis Seri Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)..... | 56 |
| 5. Indikator Keberhasilan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)..... | 59 |
| E. Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah..... | 61 |
| 1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Menurut Perspektif Ekonomi Islam..... | 61 |
| 2. Teori Dan Konsep Pembangunan Ekonomi Islam... | 68 |
| F. Kerangka Berpikir | 75 |
| G. Pengajuan Hipotesis | 77 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Waktu Dan Tempat Penelitian | 79 |
| B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian..... | 79 |
| C. Populasi, Sampel Dan Teknik Pengumpulan Data..... | 80 |
| D. Definisi Operasional Variabel..... | 81 |
| E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data..... | 84 |
| F. Uji Hipotesis..... | 87 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| A. Deskripsi Data | 89 |
| 1. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (X) | 89 |
| 2. Pembangunan Ekonomi (Y)..... | 90 |
| B. Hasil Penelitian..... | 91 |
| 1. Hasil Uji Asumsi Klasik | 91 |
| 2. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana | 95 |
| 3. Hasil Uji Hipotesis..... | 96 |
| C. Pembahasan | 97 |
| 1. Pengaruh Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2012-2021 | 97 |
| 2. Pengaruh Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia Menurut Perspektif Ekonomi Syariah | 103 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 111 |
| B. Saran..... | 112 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.1 | Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Perkapita Indonesia Tahun 2012-2021 | 3 |
| Tabel 1.2 | Data APBN Indonesia Tahun 2012-2021 | 5 |
| Tabel 1.3 | Jumlah Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Periode 2012-2021 | 7 |
| Tabel 1.4 | Ringkasan Tinjauan Pustaka | 21 |
| Tabel 3.1 | Definisi Operasional Variabel | 82 |
| Tabel 4.1 | Total Penerbitan Surat Berharga Syariah (SBSN) Periode 2012-2021 | 89 |
| Tabel 4.2 | Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Perkapita Atas Harga Konstan Indonesia Tahun 2012-2021 | 90 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran | 76 |
| Gambar 4.1 Uji Normalitas | 92 |
| Gambar 4.2 Uji Autokorelasi | 93 |
| Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas | 94 |
| Gambar 4.4 Uji Regresi Linier Sederhana | 95 |
| Gambar 4.5 Realisasi proyek SBSN 2012-2021 | 99 |
| Gambar 4.6 Sebaran Proyek SBSN 2012-2021 | 101 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Tahun 2012-2021

Lampiran 2 Data Pdb Dan Pdb Perkapita Indonesia Tahun 2012-2021

Lampiran 3 Uji Normalitas

Lampiran 4 Uji Autokorelasi

Lampiran 5 Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 6 Uji Regresi Linier Sederhana

Lampiran 7 Hasil Cek Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna langkah awal untuk memahami judul skripsi maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan kata-kata yang menjadi judul dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah: “Analisis Pengaruh Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2012-2021 Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”.

Adapun uraian pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.¹
2. Pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.²
3. Ekonomi Syariah atau ekonomi islam adalah adalah suatu cabang Ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.³

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dalam pembahasan penelitian ini adalah suatu penelitian mengenai kegiatan ekonomi dalam pandangan ekonomi

¹ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, “NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA,” no. 1 (2008): 282.

² Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi. Cetakan Keenam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 33.

³ Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali pers, 2011), 11.

syariah. Dalam hal ini terkait dengan bagaimana analisis pengaruh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap pembangunan ekonomi Indonesia Tahun 2012-2021 menurut perspektif ekonomi syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.⁴ Pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, artinya pembangunan ekonomi itu berlangsung secara terus menerus, bukan merupakan sesuatu yang bersifat insidental. Dalam analisis ekonomi pembangunan, antara satu faktor dengan faktor yang lain saling berkaitan, berhubungan dan saling memengaruhi pembangunan ekonomi. Dengan demikian, deretan peristiwa yang timbul akan mewujudkan peningkatan dalam kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari suatu tahap pembangunan ke tahap berikutnya.⁵

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional⁶ Sebuah negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika terjadi kenaikan produk nasional bruto riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Berikut merupakan data PDB serta pendapatan perkapita Indonesia tahun 2012-2021.

⁴ Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta: Gedung Agung, n.d.), 28.

⁵ Endang Mulyani, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UNY Press, 2017), 2.

⁶ Graham Bannock, R. E. Baxter, and Evan Davis, *A Dictionary of Economics* (Inggris: Penguin Books Ltd, 2004), 206.

Tabel 1.1
Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Perkapita
Indonesia Tahun 2012-2021

| No | Tahun | Produk Domestik Bruto (PDB) (Triliun Rupiah) | Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah) |
|----|-------|--|------------------------------------|
| 1 | 2012 | Rp 8.241,9 | Rp 33,3 |
| 2 | 2013 | Rp 9.084,0 | Rp 36,5 |
| 3 | 2014 | Rp 10 542,7 | Rp 41,8 |
| 4 | 2015 | Rp 11.540,8 | Rp 45,2 |
| 5 | 2016 | Rp 12.406,8 | Rp 47,96 |
| 6 | 2017 | Rp 13.588,8 | Rp 51,89 |
| 7 | 2018 | Rp 14 837,4 | Rp 56,0 |
| 8 | 2019 | Rp 15 833,9 | Rp 59,1 |
| 9 | 2020 | Rp 15.434,2 | Rp 56,9 |
| 10 | 2021 | Rp 16.970,8 | Rp 62,2 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 2022

Melihat data dari tabel diatas menunjukkan bahwa Produk ekonomi indonesia tahun 2012 tumbuh sebesar 6,23 persen dibandingkan dengan tahun 2011, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2013 tumbuh sebesar 5,78 persen dibandingkan dengan tahun 2012. Sedangkan ekonomi Indonesia tahun 2014 tumbuh 5,02 persen melambat dibanding tahun 2013 sebesar 5,58 persen, Ekonomi Indonesia tahun 2015 tumbuh 4,79 persen melambat bila dibanding tahun 2014 sebesar 5,02 persen. konomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88 persen. Ekonomi Indonesia tahun 2017 tumbuh 5,07 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 sebesar 5,03 persen, sedangkan Ekonomi Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Sedangkan tahun 2019 tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen, Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c)

dibandingkan tahun 2019, Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen, begitu pula dengan pendapatan perkapita per tahunnya. PDB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi serta pendapatan perkapita sebagai indikasi pembangunan ekonomi dimana data diatas terlihat naik setiap tahunnya akan tetapi jika melihat besaran capaian ekonomi terdapat penurunan seperti pada tahun 2019 dimana lebih rendah 0,15 persen serta pada tahun 2020 dimana masa pandemi Covid-19 indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebesar 2,07 persen.

Menurut Tikson pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi berbeda pada setiap negara, pada Negara-negara yang berada pada kondisi miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier. Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan.⁷

Dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dibutuhkan peran strategis yaitu berupa pembentukan modal. Pembentukan stok modal inilah yang bersumber dari kegiatan investasi atau pendanaan di sejumlah pasar keuangan. Modal yang ditanam oleh para investor (baik perusahaan maupun individu) akan sangat membantu perekonomian dalam menambah stok modal yang dibutuhkan.

Modal-modal tersebut ditujukan untuk proses produksi, sehingga akan menghasilkan barang dan jasa yang tentunya dapat digunakan oleh seluruh masyarakat di masa mendatang. Dalam hal ini, investasi

⁷ Deddy T Tikson, *Keterbelakangan & Ketergantungan: Teori Pembangunan Di Indonesia, Malaysia, Dan Thailand* (Makassar: Innawa, 2005), 57.

hanya sebagai salah satu alasan bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih baik dan lebih maju.

Dalam hal pembangunan ekonomi ini dibutuhkan modal serta anggaran pembiayaan yang mana terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN sendiri merupakan instrumen yang mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Berikut merupakan data APBN Indonesia tahun 2012-2021.

Tabel 1.2
Data APBN Indonesia Tahun 2012-2021

| No | Tahun | Pendapatan Negara | Belanja Negara | Surplus (Defisit) |
|----|-------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2012 | 1.338,1 | 1.491,4 | (153,3) |
| 2 | 2013 | 1.438,9 | 1.650,6 | (211,7) |
| 3 | 2014 | 1.550,5 | 1.777,2 | (226,7) |
| 4 | 2015 | 1.508,02 | 1.806,5 | (298,5) |
| 5 | 2016 | 1.555,9 | 1.864,3 | (308,3) |
| 6 | 2017 | 1.666,4 | 2.007,3 | (340,1) |
| 7 | 2018 | 1.943,7 | 2.213,1 | (269,4) |
| 8 | 2019 | 1.960,6 | 1.960,6 | (348,6) |
| 9 | 2020 | 1.647,8 | 2.595,5 | (947,7) |
| 10 | 2021 | 2.011,3 | 2.786,4 | (775,01) |

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diolah 2022

Melihat data APBN diatas dapat diketahui bahwa pendapatan dan belanja negara terus mengalami peningkatan, walaupun dengan demikian untuk memenuhi belanja negara pendapatan kita yang hanya mengandalkan pajak serta PNBP lainnya yang tetap tidak mampu membiayai belanja APBN dan selalu mengalami defisit disetiap

tahunnya. Agar terlaksanakannya pertumbuhan dan pembangunan negara maka pemerintah harus melakukan kebijakan fiskal yang tepat guna menutup defisit tersebut. Diantara strategi pemerintah untuk menambal lubang defisit tersebut, pemerintah akan menutupnya dengan melakukan penarikan utang yang terukur, melalui model pembiayaan dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baik konvensional maupun yang berprinsip syariah hingga pinjaman baik multilateral maupun bilateral.

Dizaman sekarang ini model pembiayaan syariah sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan juga mempunyai daya tarik tersendiri bagi investor. Khususnya di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Maka dengan itu dapat dipastikan bahwa model pembiayaan syariah tersebut akan laris manis di pasar modal. Model pembiayaan syariah sendiri mempunyai prinsip-prinsip yang dipegang secara konsisten yaitu terhindar dari *gharar* (spekulasi), *maisyir* (ketidakpastian), dan *riba* (bunga). Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan mengapa model pembiayaan syariah tersebut diminati oleh investor.

Salah satu model pembiayaan syariah yang ada di Indonesia adalah sukuk. Sukuk merupakan bentuk pembiayaan syariah yang yang tergolong baru yang perkembangannya sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah.⁸ Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei Tahun 2008, yang mengatur tentang sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang biasa disebut sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sedangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 69/DSN- MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada ketentuan umum dinyatakan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat di

⁸ Bahril Datuk, "Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* Vol. 14 No (2014): 11.

sebut Surat Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.⁹

Tujuan pemerintah menerbitkan Sukuk Negara sendiri adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bahwa tujuan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk membiayai pembangunan proyek. Proyek yang dapat dibiayai dengan sukuk negara adalah industri energi, telekomunikasi, transportasi, pertanian, manufaktur, dan perumahan. Selain itu, juga untuk memperluas basis sumber pembiayaan APBN atau APBD, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan dana negara atau milik perusahaan, dan memanfaatkan dana masyarakat yang belum tertangkap oleh sistem obligasi dan perbankan konvensional.¹⁰

Tabel 1.3
Jumlah Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Periode 2012-2021

| NO | TAHUN | JUMLAH |
|----|-------|---------------------|
| 1 | 2012 | 57,088,811,152,000 |
| 2 | 2013 | 53,175,875,000,000 |
| 3 | 2014 | 73,554,112,246,866 |
| 4 | 2015 | 119,514,178,000,000 |
| 5 | 2016 | 179,898,652,000,000 |
| 6 | 2017 | 192,494,267,000,000 |

⁹ Burhanuddin S, *Hukum Surat Berharga Syariah Negara Dan Pengaturannya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 5.

¹⁰ Slti Latifah, "Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 421

| | | |
|----|------|---------------------|
| 7 | 2018 | 213,930,466,000,000 |
| 8 | 2019 | 258,275,411,000,000 |
| 9 | 2020 | 367,309,537,000,000 |
| 10 | 2021 | 322,015,860,000,000 |

Sumber: DJJPR Kementerian Keuangan, diolah 2022

Pembiayaan belanja anggaran pemerintah melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) semakin meningkat melalui pengembangan instrumen dan pendalaman pasar keuangan syariah. Berdasarkan data pada Tabel 1.3 diatas, perkembangan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mengalami kenaikan yang signifikan. Dalam upaya untuk meningkatkan fleksibilitas pemerintah dalam membiayai APBN dan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, maka strategi pembiayaan difokuskan pada SBN yang tidak mempersyaratkan *underlying* dalam pemanfaatan pembiayaan yang diterima. Akibat dari strategi tersebut memberikan dampak pada penurunan jumlah penerbitan SBSN yang diterbitkan sepanjang 2021 menjadi Rp303,02 triliun atau turun 17,50% dibandingkan periode 2020. Walaupun dengan demikian perkembangan pembiayaan keuangan syariah melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara tetap mengalami kenaikan dari sejak awal penerbitannya. Penurunan jumlah penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tahun 2021 juga tidak luput dari dampak pandemi Covid-19 dimana memaksa pemerintah untuk merombak APBN nya serta mengatur strategi darurat untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang bahkan masih berlangsung hingga saat ini.

Mengenai investasi sendiri, dalam Islam sangatlah dianjurkan karena dalam ajaran Islam harta tidak hanya disimpan melainkan harus diproduktifkan, berikut merupakan salah satu sumber anjuran investasi dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. Al-Baqoroh (20) ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اؤْتَمَنَّهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Maksud dari ayat diatas menurut Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah¹¹ dijelaskan bahwa Jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak ada yang dapat mencatat utang, maka jaminannya berupa barang yang diperoleh pihak yang mengutang dari pihak yang berutang. Kalau seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain sebagai amanat, dan ia dipercayakan untuk itu, maka orang yang diamanatkan harus menyerahkannya saat diminta. Dan hendaknya ia takut kepada Allah yang memelihara dan mengawasinya, sehingga nikmat-Nya di dunia dan akhirat tidak diputus. Janganlah menyembunyikan keterangan atau persaksian ketika diminta. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa dan buruk hati. Allah Maha Mengetahui segala apa yang kalian lakukan. Dan Dia akan memberi balasan sesuai hak kalian.

¹¹ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume V (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 395.

Pada sisi lain, ekonomi Islam memiliki misi yang jauh lebih luas dan komprehensif, dimana ekonomi pembangunan bukan sekadar membangun perekonomian rakyat melainkan yang lebih penting adalah membangun sikap mental yang berarti pula membangun manusia secara utuh. Bukan saja sisi jasmani, namun juga kebutuhan spiritual- transendental.¹² Pertumbuhan ekonomi modern adalah perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat, yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran masyarakat. Dalam analisis makroekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dengan perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai oleh suatu negara yaitu Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara seperti pertambahan jumlah dan produksi barang industri, infrastruktur, pertambahan jumlah fasilitas publik, pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan beberapa perkembangan lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Latifah dalam penelitiannya “Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia” menyebutkan bahwa Penerbitan Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sangat bermanfaat bagi Indonesia dalam hal menambah pendapatan APBN. Penambahan biaya APBN digunakan untuk pembangunan proyek dari sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan. Tak hanya itu, manfaat Sukuk juga mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan branchmark di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau perusahaan, dan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem obligasi dan perbankan konvensional.¹³

¹² Almizan, “Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2016): 203–22.

¹³ Latifah, “Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia.”

Sedangkan penulis dalam penelitian ini ingin mengetahui dengan menganalisis sejauh mana pengaruh penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap pembangunan ekonomi Indonesia pada kurun waktu 2012-2021 karena dalam waktu tersebut merupakan tahun dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang berkembang serta kondisi dimana keterpurukan kondisi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, serta penulis juga melihat dari sudut pandang ekonomi islam dalam sisi instrumen pembiayaan modal dan investasi serta konsep pembangunan ekonominya sendiri.

Melihat uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah sejauh mana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mempengaruhi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu penelitian ini berjudul: **“Analisis Pengaruh Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn) Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2012-2021 Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi dari latar belakang masalah terkait pengaruh SBSN terhadap Pembangunan ekonomi Indonesia diantaranya:

1. Adanya fluktuasi data PDB perkapita dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mencerminkan adanya masalah dalam pembangunan Indonesia, yang mana pendapatan perkapita sebagai sebuah indikator ekonomi dalam melihat suatu pembangunan negara.
2. Masalah devisa anggaran APBN pada setiap tahunnya yang mengidentifikasi masalah dalam pembangunan negara dimana hal tersebut mengharuskan pemerintah untuk melakukan kebijakan belanja modal melalui pembiayaan termasuk utang guna menutup devisa anggaran agar pembangunan tetap dapat berjalan.
3. Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu kebijakan belanja modal yang pemerintah lakukan yang mana dilakukan untuk membantu pembiayaan APBN. Dalam hal

ini penulis ingin melihat seberapa besar pengaruh Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

4. Ekonomi Syariah yang mana dalam seluruh aspek ekonominya berlandaskan Al-Quran dan Hadist, termasuk berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Bagaimana pandangan ekonomi syariah dalam melihat konsep pembangunan ekonomi.

Batasan masalah pada penelitian ditetapkan agar dalam penelitian ini fokus kepada pokok permasalahan yang terjadi beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan dari dilakukannya penelitian ini tidak menyimpang dari sarasannya. Adapun ruang lingkup penelitian yang penulis lakukan terbatas pada :

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai pengaruh penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan bagaimana perspektif ekonomi syariah didalamnya.
2. Objek penelitian ini adalah Indonesia dengan data yang digunakan merupakan data pada periode waktu 2012-2021.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi indonesia tahun 2012-2021 ?
2. Bagaimana pengaruh penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap pembangunan ekonomi Indonesia tahun 2012-2021 menurut perspektif ekonomi syariah ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang sudah diuraikan diatas, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap pembangunan ekonomi Indonesia tahun 2012-2021.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap pembangunan ekonomi Indonesia tahun 2012-2021 menurut perspektif ekonomi syariah.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Secara Teotiris, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan:
 - a. Bagi akademisi, memberikan ide dan tambahan pengetahuan dalam bidang ekonomi. Tentang analisis pengaruh sukuk melalui penerbitan Surat Syariah Negara Berharga (SBSN) terhadap pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Syariah.
 - b. Bagi penulis, memberikan dan menambah wawasan mengenai analisis pengaruh sukuk melalui penerbitan Surat Syariah Negara Berharga (SBSN) terhadap pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan:
 - a. Bagi pemerintah, dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk pemerintah untuk memaksimalkan peranan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam pembangunan ekonomi khususnya pada sektor infrastruktur.
 - b. Bagi masyarakat, agar menjadi wawasan guna menjadi pertimbangan dalam melihat peranan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian yang dilakukan Siti Latifah, yang berjudul “Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia”. Dalam penelitiannya, Siti Latifah menggunakan metode *library research* dengan menggunakan data sekunder serta teknik analisis dimana studi-studi sumber data dipelajari sehingga menghasilkan kesimpulan yang aktual sesuai dengan topik penelitian. Hasil dari penelitiannya mengatakan bahwa penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sangat berperan dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia, diantaranya mendorong industri keuangan syariah nasional, meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur APBN, mendorong tertib pengelolaan BMN, mendorong tertib pengelolaan proyek infrastruktur pemerintah, menambah alternatif instrumen investasi bagi masyarakat, serta membantu BI dalam melakukan *Open Market Operation (OMO)*.¹⁴
2. Hasil penelitian yang dilakukan Anik, Iin Emy Prastiwi yang berjudul “Pengembangan Instrumen Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur”, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana menggunakan data sekunder dari berbagai sumber untuk memberi gambaran secara jelas mengenai manfaat dan peran sukuk terhadap pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian ini adalah memberikan strategi pengembangan sukuk melalui beberapa cara diantaranya strategi pengembangan sukuk *top-down* dan *bottom-up*, Strategi perencanaan *top-down* adalah penerbitan “Sukuk Wakaf” sebagai Upaya Meningkatkan Pangsa Pasar Sukuk. Sebagai produk baru, sukuk wakaf masih menghadapi beberapa kendala. Diantaranya diperlukan regulasi yang jelas dan spesifik untuk mengatur sukuk wakaf. Serta membuat dasar syariah tentang penerbitan sukuk wakaf. Strategi kedua adalah membentuk Tim APS (Percepatan Pengembangan

¹⁴ *Ibid.*, 421–27.

Sukuk). Tim ini merupakan wadah atau organisasi yang dibentuk untuk memwadahi percepatan dan pertumbuhan obligasi atau sukuk syariah. Sedangkan strategi perencanaan bottom-up adalah dengan membentuk forum EKPPPOS (Edukasi, Komunikasi, Pemasaran dan Pengembangan Obligasi Syariah). Strategi kedua adalah dengan memberikan praktikum Pasar Modal Syariah di kampus.¹⁵

3. Hasil penelitian yang dilakukan Wurjanto Nopijantoro yang berjudul “Surat Berharga Syariah Negara *Project Based Sukuk* (SBSN PBS) Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik Dalam Pembiayaan Infrastruktur”. Wurjanto dalam penelitiannya menggunakan metode desk research dengan sifat kualitatif. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa SBSN PBS atau sukuk proyek berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai instrumen alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia. SBSN PBS memiliki potensi yang cukup besar untuk terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan pasar keuangan syariah domestik yang terus meningkat. Sukuk proyek ini dapat digunakan sebagai instrumen investasi dan/atau instrumen partisipasi alternatif bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional yang membutuhkan dana besar, yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi melalui APBN. Dari sisi proyek, pemerintah harus fokus membenahi kesiapan dan perencanaan proyek infrastruktur agar pada saat sukuk diterbitkan, proyek yang bersangkutan dapat segera dilaksanakan. Untuk mendukung penerbitan SBSN PBS, pemerintah juga perlu mendorong dan meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah nasional yang masih relatif kecil jika dibandingkan dengan pasar keuangan konvensional, melalui penyempurnaan berbagai regulasi pendukung.¹⁶

¹⁵ Anik Anik and Iin Emy Prastiwi, “Pengembangan Instrumen Sukuk Dalam Medukung Pembangunan Infrastruktur,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 03 (2017): hal. 173-180

¹⁶ Wurjanto Nopijantoro, “Surat Berharga Syariah Negara *Project Based Sukuk* (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik Dalam Pembiayaan Infrastruktur,” *Substansi* 1, no. 2 (2017): 1–17.

4. Hasil penelitian yang dilakukan dari Adi Riduan yang berjudul “Analisis Pengaruh Surat Berharga Syariah Negara Terhadap Pembangunan Ekonomi tahun 2015-2018”. Dalam penelitiannya, Adi Riduan menggunakan metode kuantitatif dengan menganalisis SBSN seri Project Based Sukuk dengan skema *Underlying Aset* dan *Financing Aset* terhadap pembangunan ekonomi khusus pada sektor pendidikandengan akad *Ijarah Asset To Be Leased*. Peneliti menggunakan variabel x berupa SBSN PBS serta variabel y yakni pembangunan ekonomi pada sektor pendidikan khususnya pada kementerian agama (PTKIN). Dalam penelitiannya Adi menyimpulkan bahwa SBSN tidak berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi khususnya pada sektor pendidikan (PTKIN), serta menurut literasi yang penulis kumpulkan ia menyimpulkan bahwa SBSN merupakan investasi yang kondusif, karena memenuhi syarat dan ketentuan prinsip islam.¹⁷
5. Hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Ardi “Pengaruh Sukuk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” peneliti menggunakan metode content analysis sebagai alat menganalisa data. Peneliti menganalisis bagaimana sukuk dengan berbagai macam jenisnya dapat secara langsung maupun tidak dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi indonesia, hasilnya peneliti mengambil sebuah hipotesis dimana semakin meningkatnya suatu sukuk akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti sukuk ijarah, suatu instrumen untuk membantu pertumbuhan ekonomi indonesia.¹⁸
6. Hasil penelitian yang dilakukan Dery Fahrian dan Chenny Seftarita “Pengaruh Lelang Sukuk Terhadap Perekonomian Indonesia” dengan menggunakan variabel SBSN dan GDP dengan data sekunder yakni data kuartalan kuartal-I 2009 sampai dengan kuartal-IV 2015 dari Bank Indonesia dan Asia

¹⁷ Adi Riduan, “Analisis Pengaruh Surat Berharga Syariah Negara Terhadap Pembangunan Ekonomi Tahun 2015-2018 Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2019).

¹⁸ Muhammad Ardi, “Pengaruh Sukuk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *Iqtishaduna* 9, no. 1 (2018): 85–97.

Regional Integration Center (ARIC). Untuk menguji SBSN terhadap GDP peneliti menggunakan metode estimasi ARDL (*Auto Regressive Distributed Lag*) dengan uji unit root diantaranya uji stasionaritas variabel, penentuan lag optimal, estimasi ARDL, hasil estimasi jangka pendek, uji wald (*wald-test*) jangka pendek dan panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel SBSN dan GDP mempengaruhi perubahan GDP. GDP dalam jangka pendek dipengaruhi oleh GDP secara positif dan SBSN secara negatif. Artinya dalam jangka pendek, kenaikan jumlah SBSN yang beredar pada suatu periode akan menurunkan jumlah GDP di periode berikutnya. Dalam jangka panjang variabel GDP dipengaruhi oleh variabel GDP dan SBSN secara positif yang artinya bahwa kenaikan dari SBSN akan meningkatkan GDP dalam jangka panjang.¹⁹

7. Hasil penelitian yang dilakukan Eri Hariyanto “Efektivitas Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data dari Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan. Peneliti melalui penelitiannya menghubungkan bagaimana sukuk negara atau SBSN mendukung kebijakan fiskal yang terdapat pada APBN. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Peran SBSN sebagai instrumen pembiayaan APBN dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah realisasi penerbitan SBSN yang meningkat. Persentase nilai SBSN terhadap instrumen pembiayaan lainnya seperti SUN dan pinjaman langsung juga meningkat.

Berdasarkan dimensi ketepatan kebijakan, implementasi penerbitan SBSN dapat memecahkan permasalahan utama dalam memperoleh alternatif sumber pembiayaan defisit APBN. Sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 2008, SBSN selalu digunakan Pemerintah sebagai instrumen pembiayaan defisit APBN bersama

¹⁹ Derry Fahrian and Chenny Seftarita, “Pengaruh Lelang Sukuk Terhadap Perekonomian Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah* 1, no. 2 (2016): 446–54.

dengan instrumen pembiayaan lainnya. Berdasarkan dimensi ketepatan target, penerbitan SBSN telah berfungsi sebagai instrumen yang digunakan untuk membiayai defisit umum APBN maupun pembiayaan pembangunan proyek-proyek pemerintah. Hal ini telah sesuai dengan tujuan penerbitan SBSN berdasarkan pasal 4 UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN.²⁰

8. Hasil penelitian yang dilakukan Khavid Nurmasyhuri, Budimansyah, Eko Triyadi “Dampak Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) Dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Era Pandemi Covid-19 ; Tinjauan Ekonomi Islam”, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan assosiatif. Penelitian menggunakan data sekunder yang telah resmi di publikasi oleh Bank Indonesia (BI) dari laporan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia dengan periode pada era pandemi covid-19 yaitu Triwulan IV 2019 – Triwulan IV 2021. Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah X1 yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan X2 yaitu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sedangkan Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi. Alat statistik yang di gunakan adalah Eviews Version 9 dengan menggunakan Uji Asumsi Klasik, Uji T, Uji F dan Koefisien Determinasi (R2).

Hasil Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerbitan Surat Utang Negara (SUN) memiliki pengaruh negative dan tidak signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia era pandemi covid-19. Penerbitan Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) memiliki pengaruh positif dan signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia era pandemi covid19. Hal ini terjadi karena Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mempunyai fungsi strategis yaitu memperluas basis pasar keuangan syariah, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan tiap tahun anggaran. Tidak hanya itu saja, penerbitan Surat

²⁰ Eri Hariyanto, “Efektivitas Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN,” *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2017): 79–98

Utang Negara (SUN) menyebabkan berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang dan memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga jelas akan membebani masyarakat, khususnya para wajib pajak di Indonesia yang harus membayar pajak lebih tinggi serta di gunakan untuk membayar bunga utang luar negeri Indonesia. Dalam tinjauan ekonomi islam, Surat Utang Negara (SUN) melanggar prinsip *la tazhlimuna wa la Tuzhlamun* yakni menzalimi dan dizalimi. Ini termasuk dikarenakan Negara menzalimi diri sendiri dan menzalimi para investor karena return yang digunakan pada Surat utang negara (SUN) menggunakan bunga yang bersifat riba serta tidak adanya aset yang mendasari. alternatif instrumen investasi pada era pandemic covid-19.²¹

9. Hasil penelitian yang dilakukan Tya Ryandini “Pengaruh Dana Investasi Melalui Instrumen SUN Dan SBSN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” , peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis model koreksi kesalahan (*Error Corection Model*) serta menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) sebagai alat uji asumsi klasiknya. Penelitian ini melihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang antara variabel independen terhadap variabel dependen yakni SUN dan SBSN terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana investasi melalui instrumen SBSN berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam jangka pendek pada tingkat kepercayaan $\alpha = 0,05$. Jika jumlah penerimaan dari penerbitan SBSN meningkat sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 0,04 persen. $\ln\text{SBSN}(-1)$ memiliki nilai probabilitas 0,7346 lebih besar dari 0,05. Dalam jangka panjang, dana yang dihasilkan dari instrumen SBSN memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sehingga setiap peningkatan

²¹ K Normasyhuri, B Budimansyah, and ..., “... Surat Utang Negara (SUN) Dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi ...* 8, no. 01 (2022): 688–98

penghimpunan dana investasi dari instrumen SBSN tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.²²

10. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Reza Henning Wijaya “Investasi Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi: Optimasi Peran Sukuk Sebagai Penunjang Pembangunan Ekonomi Nasional”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis *library research*, penelitian ini melihat bagaimana sukuk dapat mendukung APBN sebagai alat penunjang pembangunan ekonomi serta bagaimana mengoptimalkan sukuk sebagai penunjang pembangunan ekonomi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerbitan SBSN sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam meng-cover defisit APBN, penulis juga melihat peluang yang besar untuk perkembangan SBSN sendiri melihat populasi muslim Indonesia yang mayoritas dimana juga perlu dibarengi dengan pembenahan sistem kebijakan terhadap sukuk serta mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam struktur sukuk.²³

²² Tya Ryandini, “Pengaruh Dana Investasi Melalui Instrumen SUN Dan SBSN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2014): 73–84

²³ Reza Henning Wijaya, “Investasi Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi: Optimasi Peran Sukuk Sebagai Penunjang Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen* 20, no. 1 (2021): 54

Tabel 1.4
Ringkasan Tinjauan Pustaka

| No | Nama Dan Tahun | Judul | Sumber | Hasil Penelitian |
|-----------|-----------------------|--|---|---|
| 1 | Siti Latifah (2020) | "Peran Sukuk Syariah Negara Dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia" | Jurnal, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI), 3(03), 2017, 173-180. | Hasil dari penelitiannya mengatakan bahwa penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sangat berperan dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia, diantaranya mendorong industri keuangan syariah nasional, meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur APBN, mendorong tertib pengelolaan BMN, mendorong tertib pengelolaan proyek infrastruktur pemerintah, menambah alternatif instrumen investasi bagi masyarakat, |

| | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|---|---|
| serta membantu BI dalam melakukan Open Market Operation (OMO). | |  <p data-bbox="282 899 370 1246">“Pembangunan Instrumen Sukung Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur”</p> | Anik dan Iin Emy Prastiwi (2017) | 2 | <p data-bbox="282 154 976 546">Hasil penelitian ini adalah memberikan strategi pengembangan sukuk melalui beberapa cara diantaranya strategi pengembangan sukuk <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i>, Strategi perencanaan <i>top-down</i> adalah penerbitan “Sukuk Wakaf” sebagai Upaya Meningkatkan Pangsa Pasar Sukuk, Sedangkan strategi perencanaan <i>bottom-up</i> adalah dengan membentuk forum EKPPPOS (Edukasi, Komunikasi, Pemasaran dan Pengembangan Obligasi Syariah). Strategi kedua adalah dengan memberikan praktikum</p> |
|--|--|---|----------------------------------|---|---|

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | | | | <p>Pasar Modal Syariah di kampus.</p> |
| 3 | <p>Wurjanto Nopijantoro (2017)</p> | <p>“Surat Berharga Syariah Negara <i>Project Based Sukuk</i> (SBSN PBS) Sebagai Instrumen Alternatif Partisipasi Publik Dalam Pembiayaan Infrastruktur”</p> | <p>Jurnal, Keuangan Negara STAN Politiknik</p> | <p>Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa SBSN PBS atau sukuk proyek berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai instrumen alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Sukuk proyek ini dapat digunakan sebagai instrumen investasi dan/atau instrumen partisipasi alternatif bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional yang membutuhkan dana besar, yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi melalui APBN.</p> |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|---|--|
| 4 | Adi Riduan (2019) | “Analisis Pengaruh Surat Berharga Syariah Negara Terhadap Pembangunan Ekonomi tahun 2015-2018” | Skripsi, UIN Raden Intan. | Dalam penelitiannya Adi menyimpulkan bahwa SBSN tidak berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi khususnya pada sektor pendidikan (PTKIN), serta menurut literasi yang penulis kumpulkan ia menyimpulkan bahwa SBSN merupakan investasi yang kondusif, karena memenuhi syarat dan ketentuan prinsip islam. |
| 5 | Muhammad Ardi (2018) | “Pengaruh Sukuk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” | Jurnal, Iqtishaduna Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam | Hasil dari penelitian ini adalah peneliti mengambil sebuah hipotesis dimana semakin meningkatnya suatu sukuk akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti sukuk ijarah, suatu instrumen untuk membantu pertumbuhan |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 6 | Dery Fahrrian dan Cheney Setfarita (2016) | “Pengaruh Lelang Sukuk Terhadap Perekonomian Indonesia” | Jurnal, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan dan Bisnis Unsyiah | ekonomi indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel SBSN dan GDP mempengaruhi perubahan GDP . GDP dalam jangka pendek dipengaruhi oleh GDP secara positif dan SBSN secara negatif. Artinya dalam jangka pendek, kenaikan jumlah SBSN yang beredar pada suatu periode akan menurunkan jumlah GDP di periode berikutnya. Dalam jangka panjang variabel GDP dipengaruhi oleh variabel GDP dan SBSN secara positif yang artinya bahwa kenaikan dari SBSN akan meningkatkan GDP dalam jangka panjang. |
| 7 | Eri Hariyanto (2017) | “Efektivitas Penerbitan Sukuk Negara Sebagai | Jurnal, Indonesian Treasury Review Jurnal | Hasil penelitian menyebutkan bahwa Peran SBSN sebagai |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | Instrumen Pembiayaan APBN” | Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik | instrumen pembiayaan APBN dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah realisasi penerbitan SBSN yang meningkat. Persentase nilai SBSN terhadap instrumen pembiayaan lainnya seperti SUN dan pinjaman langsung juga meningkat. |
| 8 | Khavid Nurmasyhuri, Budimansyah dan Eko Triyadi (2022) | “Dampak Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) Dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Era Pandemi Covid-19; Tinjauan Ekonomi Islam” | Jurnal, Jurnal Ekonomi Islam 8(01), 2022, 688-698 Jurnal Ilmiah Islam (JIIE), | Hasil Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerbitan Surat Utang Negara (SUN) memiliki pengaruh negative dan tidak signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia era pandemi covid19. Penerbitan SBSN memiliki pengaruh positif dan signifikan pada Pertumbuhan |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | |  | <p>Ekonomi Indonesia era pandemi covid19. Hal ini terjadi karena Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mempunyai fungsi strategis yaitu memperluas basis pasar keuangan syariah, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan tiap tahun anggaran. Dalam tinjauan ekonomi islam, Surat Uang Negara (SUN) melanggar prinsip <i>la tazhlimuna wa la Tuzhalamun</i> yakni menzalimi dan dizalimi, Surat utang negara (SUN) menggunakan bunga yang bersifat riba serta tidak adanya aset yang mendasari. alternatif</p> |
|--|--|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>instrumen investasi pada era pandemic covid-19.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana investasi melalui instrumen SBSN berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam jangka pendek pada tingkat kepercayaan $\alpha = 0,05$. Jika jumlah penerimaan dari penerbitan SBSN meningkat sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 0,04 persen. $\ln\text{SBSN}(-1)$ memiliki nilai probabilitas 0,7346 lebih besar dari 0,05. Dalam jangka panjang, dana yang dihasilkan dari instrumen SBSN memiliki pengaruh negatif yang tidak</p> |
| | <p>Jurnal, DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)</p> |
| <p>“Pengaruh Dana Investasi Melalui Instrumen SUN Dan SBSN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”</p> |  |
| <p>Tya Ryandini (2013)</p> | |
| <p>9</p> | |

| | | | | |
|----|----------------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | | signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. |
| 10 | Reza Henning Wijaya (2021) | "Investasi Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi: Optimasi Peran Sukuk Sebagai Penujangan Pembangunan Ekonomi Nasional". | Jurnal, Jurnal Ekonomi Syariah (JES) | Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemberian SBSN sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi indonesia dalam meng-cover defisit APBN, penulis juga melihat peluang yang besar untuk perkembangan SBSN sendiri melihat populasi muslim indonesia yang mayoritas dimana juga perlu dibarengi dengan pbenahan sistem kebijakan terhadap sukuk serta mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kabapaitas dalam struktur sukuk. |

Sumber : Data diolah penulis, 2022

Agar dapat diketahui disfungsi (kekurangan) dan *gap* atau perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan berikut merupakan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

1. Penelitian pertama menganalisis bagaimana pengaruh SBSN terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dimana peneliti menggunakan metode *Library Research* dimana peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang kemudian dianalisis, kemudian hanya menggunakan teori pertumbuhan dan pembangunan secara konvensional.²⁴

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ialah menganalisis antara hubungan SBSN terhadap pembangunan ekonomi dengan metode Kuantitatif dimana menghitung seberapa besar SBSN dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi, kemudian penulis juga melihat hal tersebut dari sisi ekonomi islam.

2. Penelitian kedua bertujuan untuk mencari strategi pengembangan instrumen pembangunan sukuk guna mendukung pembangunan terutama pada sektor infrastruktur.²⁵ Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bertujuan mencari seberapa besar sukuk negara dalam hal ini adalah SBSN mempengaruhi pembangunan ekonomi Indonesia termasuk didalamnya mengenai pembangunan infrastruktur serta *effect* lain dari penerbitannya.
3. Penelitian ketiga metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode *desk research* dimana penulis mencari serta mengeksplorasi informasi kemudian diolah sehingga mendapatkan kesimpulan.²⁶ Dalam penelitiannya berfokus pada satu produk dari SBSN saja yaitu SBSN *project based sukuk* atau yang sering disebut SBSN PBS. Sedangkan penulis dalam penelitian ini

²⁴ Latifah, "Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia."

²⁵ Anik and Prastiwi, "Pengembangan Instrumen Sukuk Dalam Medukung Pembangunan Infratraktur."

²⁶ Nopijantoro, "*Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik Dalam Pembiayaan Infrastruktur.*"

menggunakan metode kuantitatif dan meneliti seluruh seri dari terbitan SBSN baik yang melalui *private place*, institusi sampai pada seri yang menyasar pasar individu dalam kurun waktu 2012-2021.

4. Penelitian keempat meneliti bagaimana SBSN berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi hanya pada sektor pendidikan yaitu pada proyek PTKIN dari kementerian agama.²⁷ Sedangkan penulis dalam penelitian ini meneliti pengaruh terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan yang tidak hanya terpatok kepada sektor pendidikan saja.
5. Penelitian kelima perfokus pada pengaruh SBSN terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum.²⁸ Sedangkan penulis dalam penelitian ini meneliti pengaruh SBSN terhadap pembangunan ekonomi yang mana tidak hanya terfokus pada penambahan nilai PDB semata melainkan melihat aspek lainnya seperti sosial budaya serta indikator lain yang mendukung pembangunan kemudian dianalisis melalui pandangan ekonomi islam.
6. Penelitian keenam membahas hubungan SBSN terhadap *Gross Domestic Bruto (GDP)* melalui alat uji estimasi ARDL (*auto regressive distributed lag*).²⁹ Sedangkan penulis dalam penelitian ini menganalisis menggunakan metode kuantitatif dengan estimasi model OLS (*Ordinary Least Square*) dengan menghitung pendapatan perkapita yang mana sebagai indikator pembangunan dengan nilai penerbitan SBSN yang dianalisis menggunakan metode regresi linier.
7. Penelitian ketujuh bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas penerbitan sukuk negara atau SBSN sebagai instrumen pembiayaan APBN.³⁰ Sedangkan penulis dalam penelitian ini melihat tidak melihat keefektivitasan dari SBSN melainkan untuk

²⁷ Riduan, "Analisis Pengaruh Surat Berharga Syariah Negara Terhadap Pembangunan Ekonomi Tahun 2015-2018 Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

²⁸ Ardi, "Pengaruh Sukuk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia."

²⁹ Fahrian and Seftarita, "Pengaruh Lelang Sukuk Terhadap Perekonomian Indonesia."

³⁰ Hariyanto, "Efektivitas Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN."

melihat sejauh mana SBSN mempengaruhi pembangunan ekonomi dengan menghitung berapa besar SBSN dalam instrumen pembiayaan APBN.

8. Penelitian kedelapan meneliti dampak dari penerbitan surat utang negara (SUN) dan SBSN pada pertumbuhan ekonomi di era pandemi Covid-19 dimana menggunakan dua variabel x yakni SUN dan SBSN.³¹ Sedangkan penulis dalam penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel x saja yakni SBSN serta meneliti dalam kurun waktu 2012-2021 dan berfokus pada instrumen pembiayaan dengan konsep syariah.
9. Penelitian kesembilan meneliti pengaruh dana investasi melalui instrumen SUN dan SBSN terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan 2 variabel yaitu SUN dan SBSN serta dianalisis menggunakan analisis model koreksi kesalahan (*Error Correction Model*).³² Sedangkan penulis dalam penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel yaitu SBSN serta dianalisis dengan metode estimasi model OLS (*Ordinary Least Square*).
10. Penelitian kesepuluh menggunakan metode kualitatif dengan jenis kajian pustaka dengan meneliti tentang optimasi peran sukuk sebagai penunjang pembangunan ekonomi nasional.³³ Sedangkan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang melihat hubungan antara penerbitan SBSN terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dengan menghitung seberapa besar terhadap pendapatan perkapita yang mana sebagai indikator pembangunan ekonomi.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang terbagi dalam lima bab yang terdiri dari:

³¹ Normasyhuri, Budimansyah, and ..., "... Surat Utang Negara (SUN) Dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Ekonomi Islam."

³² Ryandini, "Pengaruh Dana Investasi Melalui Instrumen SUN Dan SBSN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia."

³³ Wijaya, "Investasi Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi: Optimasi Peran Sukuk Sebagai Penunjang Pembangunan Ekonomi Nasional."

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

Bab landasan teori dan pengujian hipotesis menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang menjelaskan tentang teori yang digunakan yakni teori tentang pasar modal syariah, sukuk, serta teori pembangunan ekonomi. Selain itu juga membahas mengenai hipotesis yang menjelaskan teori-teori yang menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisa penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini berisi jenis dan sifat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan ini berisi analisis dari hasil pengolahan data, pembahasan hasil penelitian ini dan menjawab hipotesis yang telah dirumuskan serta menjelaskan hasil penelitian dalam perspektif ekonomi islam.

BAB V : PENUTUP

Bab penutupan ini berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Selain kesimpulan mengenai hasil penelitian, peneliti juga menyampaikan hasil pemikiran yang berbentuk saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

A. Grand Theory

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi begitu pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Berikut merupakan teori pembangunan ekonomi yang dijadikan landasan dalam penelitian ini.

1. Teori Harrod Domar

Teori Pertumbuhan Harrod Domar merupakan sintesa dari pemikiran klasik dari Keynes mengenai makna pembentukan modal dalam kegiatan ekonomi. dalam Teori Harrod Domar, pembentukan modal tidak dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat.

Teori Harrod Domar ini mempunyai beberapa asumsi, yaitu: perekonomian dalam keadaan *full employment*, perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, kecenderungan menabung (*marginal propensity to save*) besarnya tetap, demikian juga antara rasio modal output dan rasio pertambahan modal output adalah tetap.³⁴

Menurut Harrod-domar, melihat pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stok

³⁴ Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran, Edisi Revisi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 83.

barang modal, yang memungkinkan peningkatan output. Sumber dana domestik untuk keperluan investasi berasal dari bagian produksi (pendapatan nasional) yang di tabung.³⁵ Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya stok modal akan bertambah di masa yang akan datang.

Sebagai ikhtisar dari analisis Harrod Dommar menurut Irawan dan Suparmoko pada tahun 1979 mengatakan bahwa investasi merupakan pusing dari persoalan pertumbuhan yang mantap, sebab proses investasi mempunyai dua sidat, yaitu menciptakan pendapatan dan menaikkan kapasitas produksi nasional serta laju pertumbuhan yang seimbang tergantung pada besarnya angka pengganda (*multiplier*) dan tingkat produktivitas investasi yang baru.³⁶

Secara sederhana teori Harrod-domar ini mengatakan bahwa tabungan berkorelasi positif dengan persediaan modal. Tingkat tabungan yang lebih tinggi akan memungkinkan investasi modal yang besar. Sebagai contoh tingkat tabungan domestik mewakili tabungan dari 3 (tiga) sektor makroekonomi yakni rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa pasokan adanya dana yang dapat dipinjamkan didalam perekonomian. Ketika pasokan dana yang dapat dipinjamkan, perekonomian dapat menggunakan untuk mengakumulasi modal.

Sebagai contoh, dalam sektor rumah tangga mereka menabung dan menginvestasikan uang ke berbagai instrumen keuangan seperti deposito, saham maupun obligasi. Ketika mereka membeli obligasi korporasi, perusahaan penerbit dapat menggunakan untuk belanja modalseperti membeli mesin, dan membuka atau mendirikan pabrik baru. Sehingga semakin tinggi tabungan rumah tangga, semakin tinggi peluang untuk mengakumulasi modal.

Begitu pula dengan berinvestasi atau dengan membeli obligasi negara maka sama halnya dengan membantu pemerintah untuk

³⁵ Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: Raharja Prathama, 2001), 143.

³⁶ Mulyani, *Ekonomi Pembangunan*, 319.

mengakumulasi belanja modal yang mana akan digunakan untuk proses pembangunan negara.

2. Teori Adam Smith

Adam Smith merupakan ahli ekonomi yang cukup perhatian terhadap masalah pembangunan, seperti dapat kita simak pemikirannya dalam karya bukunya yang berjudul “*An-Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nation*”. Buku ini pada dasarnya memberikan pengetahuan tentang hal apa yang akan menyebabkan suatu bangsa dapat mencapai kesejahteraan dan menurut Adam Smith hal itu hanya dapat dilakukan dengan “sistem ekonomi pasar”.³⁷ Salah satu pemikiran Adam Smith yang terkenal adalah mengenai akumulasi modal serta investasi.

Adam Smith menekankan bahwa proses akumulasi modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Akumulasi modal merupakan syarat utama terjadinya proses pembangunan ekonomi, dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal.³⁸

Menurut Smith, investasi dilakukan Karena pemilik modal mengharapkan untung, dan harapan masa depan keuntungan tergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata. Keuntungan cenderung menurun dengan adanya kemajuan ekonomi. Kondisi ini dapat digambarkan, bahwa pada waktu laju pemumpukan modal meningkat maka persaingan antar pemilik modal juga akan meningkat dengan sendirinya tingkat upah juga akan meningkat dan pada gilirannya akan menurunkan keuntungan pemilik modal.³⁹

³⁷ A. Jajang W. Mahri et al., *Ekonomi Pembangunan Islam*, 2021, 65.

³⁸ Muhammad Hasan and Muhammad Aziz, *PEMBANGUNAN EKONOMI & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, Edisi Dua (Makassar: CV. Nur Lina, 2018), 26.

³⁹ *Ibid.*, 27.

Modal diperoleh dari tuan tanah atau bangsawan. Mereka ini yang mampu untuk melakukan investasi. Sebaliknya, para pengusaha atau kaum kapitalis yang mengembangkan modal dari tuan tanah atau bangsawan. Pada umumnya modal ini digunakan untuk perdagangan. Apabila stok para pedagang kaya beralih ke bidang perdagangan yang sama, maka persaingan antar mereka secara alamiah cenderung menurunkan keuntungan dan bila peningkatan yang sama terjadi pada stok di seluruh bidang perdagangan yang dilakukan dalam masyarakat yang sama, persaingan yang sama seperti itu pasti akan menghasilkan pengaruh yang sama. Jadi dengan adanya pertumbuhan stok modal di dalam perekonomian, akan terjadi persaingan antar pengusaha dalam mendapatkan tenaga kerja. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang layak pengusaha cenderung menawarkan tingkat upah yang tinggi dan karena itu menurunkan tingkat keuntungan.

Hubungan teori diatas dengan penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang tak dapat dipisahkan dengan pembangunan ekonomi. Dimana keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari laju pertumbuhannya. Ketersediaan stok modal yang cukup serta peran strategis pemerintah merupakan faktor penentu dalam proses pembangunan, setiap negara memiliki karakteristik masing-masing yang mana akan menjadi dasar dari strategi pembangunannya. Indonesia dengan populasi masyarakat yang mayoritas islam menjadikannya sebuah kelebihan dimana produk keuangan syariah mendapat perhatian yang menarik bagi masyarakatnya. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh pemerintah guna membantu dalam proses pembangunan negara dengan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dengan demikian pemerintah dapat menjalankan pembangunannya, serta masyarakat juga akan menerima manfaat investasinya.

B. Konsep Pembangunan Ekonomi

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana terjadi peningkatan output ekonomi secara agregat.⁴⁰ Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan produktivitas pelaku ekonomi yang biasanya diukur melalui pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita secara sederhana memberikan gambaran berapa nilai ekonomi yang diberikan oleh seorang individu pada suatu periode tertentu. Perubahan besaran pendapatan perkapita diasumsikan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara fokus, pengertian pembangunan menurut perspektif ekonomi tradisional ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan paradigma baru, pembangunan didefinisikan sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan struktur sosial, sikap populer, institusi nasional yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan. Perubahan pembangunan yang terjadi harus melibatkan sistem sosial secara utuh, pemenuhan kebutuhan dasar secara menyeluruh, serta mengakomodir semua kepentingan individu dan kelompok sosial dalam sistem tersebut.⁴¹

Perubahan definisi pembangunan ini menunjukkan bahwa peningkatan output seperti pandangan tradisional tetap menjadi fokus pembangunan. Namun demikian, dalam implementasinya harus sejalan dengan fokus lain yang mungkin berseberangan dengan fokus tradisional. Terlepas dari perbedaan yang ada, pada dasarnya pembangunan mencoba menciptakan sistem kehidupan yang lebih baik dan lebih humanis.

Nilai Inti dan Tujuan Pembangunan Terciptanya paradigma dan definisi pembangunan yang baru, menjadikan definisi negara yang dianggap sukses dalam menjalankan sebuah pembangunan menjadi bervariasi. Hal ini tergantung pada indikator yang digunakan. Namun, paling tidak secara umum jika mengacu pada

⁴⁰ Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2006), 46.

⁴¹ Mahri et al., *Ekonomi Pembangunan Islam*, 7.

perspektif yang saat ini banyak berkembang, terdapat tiga nilai inti yang dapat dijadikan dasar konsep dan petunjuk praktis dalam memahami definisi dasar dari pembangunan :⁴² Kebutuhan pokok (*Sustenance*), Martabat (*Self-Esteem*) dan Kebebasan (*Freedom from Servitude*).

2. Indikator Pembangunan Ekonomi

Indikator adalah sesuatu yang memberikan kunci untuk pemahaman kompleks atau masalah yang lebih penting, bisa membuat jelas suatu kecenderungan atau fenomena yang tidak segera terdeteksi. Penggunaan indikator dan variabel pembangunan akan berbeda-beda untuk setiap negara. Di negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier. Sejumlah indikator ekonomi yang biasa digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita, *Gross National Product*/GNP atau *Gross Domestic Product*/GDP, serta indikator yang bersifat lebih ke sosial adalah Indeks Kualitas Hidup (IKH) serta Indeks Pembangunan Manusia.⁴³

a. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita adalah jumlah (nilai) barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati

⁴² Todaro and Smith, *Pembangunan Ekonomi*, 37.

⁴³ Endang Mulyani, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UNY Press, 2017),

apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu negara secara rata-rata telah meningkat. Pendapatan per kapita yang meningkat merupakan salah satu tanda bahwa rata-rata kesejahteraan penduduk telah meningkat. Pendapatan per kapita menunjukkan pula apakah pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil, berapa besar keberhasilan tersebut, dan akibat apa yang timbul oleh peningkatan tersebut.⁴⁴

Suatu negara dianggap berhasil melaksanakan pembangunan ekonomi bila pertumbuhan ekonomi masyarakatnya tinggi, yaitu dilihat dari prosuktivitas suatu negara pada setiap tahunnya. Dalam istilah teknis ekonominya produktivitas suatu negara diukur oleh PNB (*Product National Bruto*) dan PDB (*Product Domestic Bruto*).

Oleh karenanya GNP dan GDP mengukur hasil keseluruhan dari suatu negara padahal dengan kondisi besar negara yang berbeda beda, maka digunakan GNP perkapita atau GDP perkapita. Berdasarkan itu pula dianggap bahwa sebuah negara yang memiliki GDP perkapita \$1000 per tahun dianggap lebih maju daripada negara dengan GDP perkapita \$750 per tahun.⁴⁵

Salah satu kelemahan dari tingkat pendapatan perkapita sebagai indikator tingkat kesejahteraan adalah anggapan bahwa kenyataan tingkat kesejahteraan masyarakat bukan saja ditentukan oleh tingkat pendapatan mereka, tetapi juga tergantung pada faktor lain (faktor yang bersifat nonekonomi). Keberatan lain terhadap penggunaan pendapatan perkapita dalam menentukan tingkat kesejahteraan, didasarkan pada keyakinan bahwa kesejahteraan suatu masyarakat merupakan suatu hal yang subjektif.⁴⁶

Artinya setiap orang mempunyai tujuan, pandangan dan cara-cara hidup yang berbeda. Dengan demikian, setiap orang

⁴⁴ *Ibid.*, 26.

⁴⁵ Santi.r Siahaan, Elvis.F Purba, and Ridhon MB Simangungson, *Pengantar Ekonomi Pembangunan* (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2001), 39.

⁴⁶ Mulyani, *Ekonomi Pembangunan*, 31.

memberikan nilai-nilai yang berbeda terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa kekayaan merupakan unsur penting dalam meraih kesejahteraan hidup, karena dengan uang orang dapat memenuhi kebutuhannya. Tetapi sebagian yang lain beranggapan bahwa keagamaan yang merupakan unsur penting untuk mencapai kesejahteraan hidup. Di samping itu ada pula masyarakat yang beranggapan bahwa lebih sejahtera apabila dapat memperoleh waktu senggang (*leisure*) yang lebih banyak, dan enggan bekerja keras untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

b. Indeks Kualitas Hidup (IKH)

Kualitas hidup ialah perbedaan antara keinginan yang ada dibandingkan perasaan yang ada sekarang. Pernyataan ini dikenal dengan sebutan "*Calman's Gap*". Calman menerangkan pentingnya mengetahui perbedaan antara perasaan yang ada dengan keinginan yang sebenarnya. Sebagai contoh dengan membandingkan suatu keadaan antara "di mana seseorang berada" dengan "di mana seseorang ingin berada". Jika perbedaan antara kedua keadaan ini lebar, ketidakcocokan ini menunjukkan bahwa kualitas hidup seseorang tersebut rendah. Sedangkan kualitas hidup tinggi jika perbedaan yang ada antara keduanya kecil. Beberapa pendekatan fenomenologi dari kualitas hidup menekankan tentang pentingnya persepsi subjektif seseorang dalam memfungsikan kemampuan mereka sendiri dan membandingkannya dengan standar kemampuan internal yang mereka miliki agar dapat mewujudkan sesuatu menjadi lebih ideal dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Stiglitz, Sen & Fitoussi Dalam buku endang Mulyani menyebutkan ada beberapa bidang yang terkait dengan kualitas hidup, diantaranya yaitu ⁴⁷ : kesehatan, pendidikan, aktivitas personal, hak suara politik dan tata kelola pemerintahan, koneksi sosial, kondisi lingkungan, serta ketidakamanan

⁴⁷ *Ibid.*, 37.

pribadi. Karena penelitian oleh ketiga ahli tersebut terkait dengan pendidikan, maka penulis hanya akan membahas pendidikan.

Terkait dengan pendidikan, Stiglitz, Sen & Fitoussi mengatakan bahwa pendidikan penting bagi kualitas hidup, terlepas dampaknya pada pendapatan dan produktivitas masyarakat, dimana masyarakat yang lebih terdidik pada umumnya memiliki status kesehatan yang lebih baik, pengangguran yang lebih sedikit, koneksi sosial yang lebih banyak, dan keterlibatan yang lebih besar dalam kehidupan sipil dan politik.

Indikator pendidikan meliputi beragam bidang. Beberapa mengacu pada input (tingkat pendaftaran sekolah, anggaran pendidikan, dan sumber daya sekolah), sementara yang lain mengacu pada output (tingkat kelulusan, lamanya tahun bersekolah, pengukuran berbasis tes standar atas tingkat melek huruf dan melek angka). Dari indikator-indikator ini yang ada, indikator yang mana lebih relevan bergantung pada taraf pembangunan suatu negara dan pada tujuan proses evaluasi itu sendiri. Sebagian indikator yang paling relevan untuk mengkaji dampak pendidikan terhadap kualitas hidup adalah ukuran kompetensi seseorang, yang mengukur pendidikan dan outcome lain yang penting bagi kualitas hidup di tingkat individu.

c. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar. Ketiga bidang tersebut yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Secara umum metode penghitungan IPM yang disajikan dalam modul ini sesuai dengan metode yang digunakan *The United Nations Development Programme* (UNDP) dalam menghitung HDI (*Human Development Index*).

Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) telah menerbitkan indeks pembangunan manusia

(*human development index* - HDI) yang mengartikan definisi kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar pendapatan domestik bruto (PDB). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak.⁴⁸ Ada beberapa indikator dalam penentuan IPM yang diubah antaranya angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.

3. Modal Dalam Pembangunan Ekonomi

Teori pembangunan yang dikemukakan oleh Harrold-Domar menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Apabila tabungan dan investasi rendah maka rendah pula pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Dalam pembangunan masalahnya adalah masalah menambahkan investasi modal, sedangkan keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Jika terdapat modal yang memadai lalu modal tersebut diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi.⁴⁹

Modal atau kapital adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk menciptakan dan atau menambah output. Kapital terdiri atas barang-barang yang dibuat untuk penggunaan produksi pada masa yang akan datang seperti bangunan, pabrik, mesin maupun alat-alat yang dipergunakan untuk proses produksi. Dilihat dari fungsinya dalam pembangunan ekonomi, kapital mempunyai dua fungsi pokok yaitu:⁵⁰

⁴⁸ “Indeks Pembangunan Manusia,” n.d., www.bps.go.id.

⁴⁹ Mulyani, *Ekonomi Pembangunan*, 53.

⁵⁰ Mulyani, *Ekonomi Pembangunan*, 55.

- a. Sebagai pendorong perkembangan ekonomi.

Peran kapital sebagai pendorong meliputi: investasi dalam pengetahuan teknik, perbaikan dalam pendidikan, perbaikan dalam kesehatan, dan peningkatan keahlian.

- b. Sebagai sumber menaikkan tenaga produksi.

Dalam fungsi yang kedua ini, kapital tidak hanya berbentuk fisik berupa pabrik, mesin mesin akan tetapi *human capital*. Fungsi kapital dalam jangka panjang adalah untuk menaikkan produktivitas. Seperti yang telah dijelaskan diatas, kapital tidak saja berwujud pabrik-pabrik dan perlengkapan, tetapi juga berwujud “human capital“. Keadaan capital di negara berkembang relatif langka. Hal ini disebabkan oleh akumulasi capital di negara-negara tersebut sedikit. Beberapa ekonom mengatakan bahwa kemiskinan di suatu negara itu dikarenakan kurangnya kapital. Mereka menganggap kapital adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Padahal kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Dalam pembentukan kapital itu sendiri, yang perlu dicermati adalah bagaimana penawaran dan permintaan kapital itu terbentuk. Penawaran kapital rendah bila tabungan rendah, tabungan rendah karena pendapatan rendah, dan pendapatan rendah karena produktivitas rendah. Selain itu, sebagian besar pendapatan digunakan untuk konsumsi, sehingga tabungan rendah. Tambahan kapital yang besar belum tentu menyebabkan lancarnya proses perkembangan ekonomi.

Secara Finansial, sumber dana pembangunan ekonomi dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁵¹

- a. Tabungan Masyarakat (*Voluntary Saving*)

Tabungan masyarakat adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Hal ini dapat berupa tabungan, taska, tahapan,

⁵¹ Mulyani, *Ekonomi Pembangunan*, 56.

premi asuransi, dan deposito berjangka. Tabungan ini dikelola bank untuk dipinjamkan pada investor.

b. Pajak atau tabungan paksa (*Forced Saving*)

Dari segi distribusi pendapatan pajak dapat mempersempit perbedaan pendapatan, tetapi dapat juga memperlebar jurang perbedaan pendapatan. Pajak yang progresif artinya pajak yang semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin tinggi pula pajak yang dikenakan. Sebaliknya, pajak regresif adalah apabila pendapatan semakin tinggi maka semakin rendah persentase pajak yang dikenakan. Untuk pajak proposional, persentase pajak tetap walaupun tingkat pendapatannya tinggi.

c. Tabungan pemerintah

Tabungan pemerintah diperoleh dari sisa penerimaan rutin yang dipakai untuk membiayai pengeluaran rutin. Atau lebih sederhananya, tabungan pemerintah adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Semakin besar tabungan pemerintah, jelas semakin besarlah dana yang tersedia untuk pembangunan.

d. Pinjaman pemerintah

Pinjaman pemerintah dapat berupa pinjaman sukarela dan pinjaman paksaan yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Pinjaman sukarela merupakan pinjaman yang diterima oleh pemerintah secara sukarela dari pihak mana saja baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pinjaman paksa merupakan jenis pinjaman yang dapat dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pinjaman dalam negeri merupakan jenis pinjaman yang dapat diperoleh dari penduduk negeri sendiri. Konsekuensinya adalah tidak ada tambahan dana secara makro karena tidak terjadi aliran dana masuk ke negeri kita. Pinjaman luar negeri merupakan jenis pinjaman yang diperoleh pemerintah dari individu ataupun dari pemerintah negara lain.

C. SUKUK

1. Pengertian Sukuk

Sedangkan menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), berpendapat lain mengenai pengertian sukuk. Menurut organisasinya, sukuk adalah sertifikat nilai yang direpresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti penerimaan nilai sertifikat, dan penggunaannya sesuai rencana. Demikian pula bagian dan kepemilikan aset berwujud, barang, atau jasa, atau modal dari proyek tertentu atau modal dari kegiatan investasi tertentu. Setiap sukuk yang diterbitkan harus memiliki aset dasar. Klaim kepemilikan atas sukuk didasarkan pada aset/proyek tertentu.⁵² Penggunaan dana hasil sukuk juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Berbeda dengan proses obligasi yang dapat digunakan secara bebas tanpa memperhatikan ketentuan syariah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sukuk adalah suatu instrumen yang inovatif serta sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang dapat membantu proses penghimpunan dana guna pembangunan bagi negara maupun perusahaan serta meningkatkan modal usaha dalam pengembangan usaha bagi yang menerbitkan.

2. Dasar Hukum Sukuk

Ada beberapa Landasan hukum sukuk salah satunya yang terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam Q.S Al-Baqoroh (2) : 275.⁵³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ

⁵² Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2011), 112.

⁵³ Maula Nasrifah, "Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 71,

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat diatas dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah⁵⁴ dimana Orang-orang yang melakukan praktek riba, usaha, tindakan dan seluruh keadaan mereka akan mengalami kegoncangan, jiwanya tidak tenteram. Perumpamaannya seperti orang yang dirusak akalnya oleh setan sehingga terganggu akibat gila yang dideritanya. Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha. Kedua-duanya halal. Allah membantah dugaan mereka itu dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka. Dan persamaan yang mereka kira tidaklah benar. Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba. Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang diambilnya sebelum

⁵⁴ Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 351.

turun larangan, dengan tidak mengembalikannya. pengharaman riba dalam al-Qur'an dan agama-agama samawi lainnya adalah sebuah aturan dalam perilaku ekonomi. Ini sesuai dengan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa uang tidak bisa menghasilkan uang. Para ahli ekonomi menetapkan beberapa cara menghasilkan uang. Di antara cara yang produktif adalah dengan bekerja di beberapa bidang usaha seperti industri, pertanian dan perdagangan. Dan yang tidak produktif adalah bunga atau praktek riba, karena tidak berisiko. Pinjaman berbunga selamanya tidak akan merugi, bahkan selalu menghasilkan. Bunga adalah hasil nilai pinjaman. Kalau sebab penghasilannya pinjaman, maka berarti usahanya melalui perantara orang lain yang tentunya tidak akan rugi. Banyaknya praktek riba juga menyebabkan dominasi modal di suatu bidang usaha. Dengan begitu, akan mudah terjadi kekosongan dan pengangguran yang menyebabkan kehancuran dan kemalasan.

Selain dalam Al-Qur'an salah dasar hukum sukuk dijelaskan didalam Hadist Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani sebagai berikut:⁵⁵

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Landasan hukum yang menjadi dasar sukuk mengacu pada kaidah *fiqh* sebagai berikut:⁵⁶

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

⁵⁵ Maula Nasrifah, "Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam," 71.

⁵⁶ "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002," n.d.

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الصَّرُورَةِ

Artinya: "Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

Artinya: "Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)."

3. Jenis-jenis Sukuk

Jenis-jenis sukuk diterbitkan berdasarkan akad yang menjadi dasarnya. Berbagai jenis struktur sukuk yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan justifikasi dari AAOIFI adalah sebagai berikut⁵⁷ :

a. Sukuk Ijarah

Merupakan Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu asset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri.

b. Sukuk Mudharabah

Yakni Sukuk yang diterbitkan dengan akad mudharabah, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sedangkan kerugian yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (*Shahibul mal*).

c. Sukuk Musyarakah yakni

Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerjasama

⁵⁷ Maula Nasrifah, "Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam."

menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan ataupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan partisipasi modal masing-masing pihak.

d. *Sukuk Istisna'*

Yakni Sukuk yang diterbitkan akad *istisna'* dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan ketentuan khusus Fatwa DSN No. 32 /DSN/IX/2002 tentang obligasi syariah disebutkan bahwa akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain: *mudharabah (muqaradhah) qiradh, musyarakah, murabahah, salam, istishna', dan ijarah*.⁵⁸ Akad-akad tersebut juga kan menentukan jenis sukuknya. Namun dalam praktiknya, hanya ada dua bentuk akad yang secara umum digunakan, yakni akad ijarah dan mudharabah. Kedua bentuk akad ini akan menentukan jenis sukuk yang akan menjadi pembahasan selanjutnya.

Berdasarkan institusi yang menerbitkan sukuk di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sukuk yang dikeluarkan pemerintah (sukuk negara) dan sukuk korporasi.

a. Sukuk Negara

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2008 pasal 1 ayat (1), Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.⁵⁹ Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah objek pembiayaan SBSN atau barang milik negara yang memiliki

⁵⁸ "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002."

⁵⁹ Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2008 Pasal 1 ayat (1)

nilai ekonomis.⁶⁰ Sejak berlakunya undang-undang tersebut pemerintah mulai menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai alternatif pembiayaan belanja negara.

b. Sukuk Korporasi

Sukuk korporasi merupakan sukuk yang dikeluarkan oleh perusahaan (swasta) sebagai emiten. Emiten penerbit sukuk tersebut berasal dari beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri swasta. Dalam hal ini yang menjadi underlying asset dari sukuk korporasi ini adalah aset dari perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki. Yang menjadi dasar peraturan mengenai sukuk korporasi yaitu Undang-Undang pasar modal No. 8 tahun 1995 dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002.⁶¹ Berdasarkan akad yang digunakan, penerbitan sukuk korporasi di Indonesia baru menggunakan akad *Mudharabah* dan *Ijarah*.

D. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

1. Pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Menurut fatwa DSN No. 69/DSNMUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dijelaskan bahwa Surat Berharga Syariah Negara atau yang biasa disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian (صحة) kepemilikan aset SBSN, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing.⁶²

Pengertian Surat Berharga Syariah Negara juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Obligasi syariah (sukuk) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah,

⁶⁰ Adrian Sutedi, "Aspek Hukum Obligasi Dan Sukuk," *Jurnal Akuntansi* Volume 9, no. 4 (2006): 141.

⁶¹ Fauzian Rahman Aulia, "Aspek Obligasi Dan Sukuk," *Jurnal Tinjauan Atas Sukuk Ijarah* 12, no. 2 (2014): 5.

⁶² Fatwa DSN MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008, 6

sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.⁶³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menerbitkan SBSN dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.⁶⁴

Sedangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau disebut juga Surat Negara adalah surat berharga negara yang penerbitannya berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sukuk Negara merupakan salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan penerbitannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau biasa disebut Sukuk Negara didefinisikan sebagai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sebagai instrumen berbasis syariah, penerbitan Sukuk Negara memerlukan *underlying asset* di mana hingga saat ini terdiri dari Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, proyek Pemerintah Pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan jasa haji. Sukuk Negara telah mulai diterbitkan di pasar domestik sejak tahun 2008 dan di pasar internasional sejak tahun 2009.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) disebutkan bahwa Surat

⁶³ UU RI No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), 2

⁶⁴ Dahlan Siamat, *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara)*, 2nd ed. (Jakarta, 2010), 16.

Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di pasar sekunder. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk membiayai pembangunan proyek.

2. Dasar Hukum Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Dasar hukum penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) hingga tahun 2014 Dewan Syariah Indonesia - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan 5 (lima) buah fatwa yang dapat dijadikan dasar hukum sebagai pedoman syariah dalam penerbitannya, diantara fatwa tersebut adalah :

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*.
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah Asset to be Leased*.⁶⁵

3. Akad dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang SBSN disebutkan bahwa terdapat beberapa bentuk akad yang dapat digunakan dalam penerbitan SBSN, diantaranya yaitu:⁶⁶

⁶⁵ Undang undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁶⁶ Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN

- a. SBSN dengan akad *Ijarah*, yaitu SBSN yang diterbitkan dengan menggunakan akad *ijarah*. Dimana salah satu pihak dapat bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang telah disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. SBSN ini dibedakan menjadi *ijarah al-muntahiya bittamlik* (*sale and lease back*), *Ijarah asset to be lease* dan *ijarah headlease and sublease*.
- b. SBSN dengan akad *Mudharabah*, yaitu SBSN yang mempresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad *mudharabah*, dengan menunjukan satu partner atau pihak lain sebagai *mudharib* (pengelola usaha) dalam melakukan pengelolaan usaha tersebut.
- c. SBSN dengan akad *Musyarakah*, yaitu SBSN yang diterbitkan dengan tujuan untuk memperoleh dana dalam menjalankan proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah berjalan, atau untuk membiayai kegiatan bisnis yang dilakukan berdasarkan akad *musyarakah*, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik proyek atau aset kegiatan usaha tersebut, sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Sukuk *Musyarakah* tersebut dapat dikelola dengan akad *musyarakah* (partisipasi), *mudharabah* atau agen inventasi (*wakalah*).
- d. SBSN dengan akad *Istishna'*, yaitu SBSN yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang, sehingga yang akan diproduksi tersebut menjadi milik pemegang sukuk.
- e. SBSN berdasarkan akad-akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dua atau lebih dari akad sebagaimana dimaksud pada poin satu sampai dengan lima.

4. Jenis seri penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Jika dilihat dari seri penerbitannya, di Indonesia sendiri dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya yaitu :

a. SBSN seri *Islamic Fixed Rate* (IFR),

Merupakan seri SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor dengan nominal pembelian yang cukup besar. Seri ini telah diterbitkan sejak tahun 2008, dengan cara *bookbuilding* dan dengan cara lelang sejak tahun 2009. IFR bersifat *tradable* (dapat diperdagangkan) dengan tingkat imbal hasil tetap.⁶⁷

b. Sukuk Ritel (SR)

Adalah seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan pemerintah dengan cara *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia. Seri ini mulai diterbitkan pada tahun 2009 (Sejauh penelusuran penulis, sampai saat ini telah diterbitkan dalam sembilan seri yaitu SR001/2009, SR002/2010, SR003/2011, SR004/2012, SR005/2013, SR006/2014, SR007/2015, SR008/2016, dan SR009/2017, SR-010/2018, SR011/2019, SR012/2020, SR013/2020, SR014/2021, dan SR015/2021. Seri ini bersifat *tradable* dengan imbal hasil tetap).

c. SBSN seri Sukuk Negara Indonesia (SNI)

Merupakan seri SBSN yang diterbitkan Pemerintah dalam dominasi valuta asing (US Dollar) dengan cara *bookbuilding*. Seri sukuk ini mulai diterbitkan pada tahun 2009, seri ini bersifat *tradable* dengan imbal hasil tetap.

d. SBSN seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

Merupakan SBSN yang diterbitkan berdasarkan penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat dalam SBSN oleh Departemen Agama dengan cara *private placement*.

⁶⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, pasal (1).

Penerbitan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama pada bulan April 2009. Penerbitan SDHI menggunakan akad *Ijarah al-khadamat* dan bersifat *non-tradable* (tidak bisa diperdagangkan).

e. Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (*SPNS/Islamic Treasury Bills*)

Merupakan Sukuk Negara jangka pendek yang diterbitkan guna membantu dalam pengelolaan kas pemerintah, yaitu untuk mengelola *cash mismatch* pada Rekening Kas Negara, dan untuk mendukung dalam pengembangan pasar uang syariah (*Islamic Money Market*) domestik. Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (*SPN-S/Islamic Treasury Bills*) memiliki beberapa fitur diantaranya bertenor jangka pendek, diterbitkan dalam denominasi rupiah di pasar perdana dalam negeri secara diskonto, serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*tradable*). Dalam pemenuhan fitur-fitur tersebut, Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (*SPN-S/Islamic Treasury Bills*) distruktur dengan menggunakan akad *Ijarah Sale and Lease Back* dengan *underlying asset* berupa Barang Milik Negara (BMN) berbentuk tanah dan/atau bangunan dan secara syariah dapat diperdagangkan. Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (*SPN-S/Islamic Treasury Bills*) yang diterbitkan adalah bertenor 6 bulan di mana penerbitan yang pertama kali dilakukan dengan cara lelang pada tahun 2011. Dan hingga saat ini, Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (*SPN-S/Islamic Treasury Bills*) diterbitkan secara reguler melalui lelang di pasar perdana dalam negeri.⁶⁸

f. *Project Based Sukuk* (PBS)

Adalah Sukuk Negara yang diterbitkan dalam rangka pembiayaan proyek. Dengan tenor menengah-panjang, dan dalam denominasi rupiah di pasar perdana dalam negeri,

⁶⁸ Dr. Muliaman and D. Haddad, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016," 2016.

dengan tingkat imbalan tetap yang dibayarkan setiap semester (*semiannual*), serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder. *Project Based Sukuk* (PBS) distruktur dengan menggunakan akad *Ijarah to be Leased* dengan *underlying asset* berupa kombinasi antara Barang Milik Negara (BMN) dan proyek, di mana sebagian besar porsinya berupa proyek-proyek pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). *Project Based Sukuk* (PBS) pertama kali diterbitkan pada akhir tahun 2011 secara lelang (namun pada saat itu tidak ada penawaran (*incoming bids*) yang dimenangkan) dan ditunjukkan untuk investor institusi dengan nominal pembelian yang besar. Dan hingga saat ini, *Project Based Sukuk* (PBS) sudah diterbitkan secara reguler melalui lelang di pasar perdana dalam negeri.⁶⁹ Dari mulai diterbitkannya seri ini sudah terbit 31 seri yakni seri PBS001-PBS0031. Seri PBS ini juga diterbitkan dalam denominasi dolar yang disebut dengan USDPBS.

g. Sukuk Tabungan (ST)

Adalah varian dari Sukuk Ritel yang merupakan instrumen investasi yang khusus untuk ditujukan kepada individu Warga Negara Indonesia (WNI). Sebagai salah satu varian produk Sukuk Negara untuk investor individu, Sukuk Tabungan (ST) dapat lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia karena minimum pembelian yang lebih rendah yaitu sebesar Rp. 2 juta. Sukuk Tabungan (ST) juga memberikan imbalan tetap (*fixed*) yang dibayarkan setiap bulan, dan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan tabungan investasi masyarakat yaitu 2 tahun. Meskipun Sukuk Tabungan (ST) tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*non-tradable*), tetapi Sukuk Tabungan (ST) memiliki fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) setelah dimiliki selama 1 tahun (12 bulan periode imbalan). Sukuk Tabungan (ST) ini baru dimulai pada tahun 2016 dengan menggunakan struktur akad *wakalah* dengan

⁶⁹ *Ibid.*, 16.

underlying asset berupa kombinasi Barang Milik Negara (BMN) dan proyek di mana porsi aset berwujudnya (*tangible asset*) kurang dari 51% dari nilai nominal penerbitan sehingga Sukuk Tabungan (ST) bersifat *non-tradable*.

h. Sukuk Wakaf (SW)

Sukuk wakaf atau yang biasa disebut dengan istilah *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* adalah sukuk yang diterbitkan dalam rangka mengoptimalkan manfaat aset wakaf dan/atau imbal hasilnya untuk kepentingan umum (mashalil ámmah) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sukuk Wakaf adalah investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi wakif dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sukuk wakaf termasuk ke dalam wakaf uang karena objek wakaf berbentuk uang, bersifat tetap (uang tidak boleh berkurang), dan hanya bisa diinvestasikan untuk dimanfaatkan hasilnya bagi kemaslahatan umat. Wakif (pihak yang berwakaf) dapat menyalurkan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang sudah ditunjuk oleh Menteri Agama, dengan cara membuat pernyataan kehendak wakif secara tertulis. Sukuk wakaf adalah jenis instrumen sukuk atau obligasi syariah yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Seri ini juga terdapat seri ritelnya yang mana dapat dijangkau oleh investor individu atau yang disebut dengan SWR.

5. Indikator keberhasilan penerbitan SBSN

SBSN sebagai produk yang diterbitkan langsung oleh pemerintah yang mana dalam hal ini kementerian keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR). Dalam hal ini DJPPR setiap tahunnya akan merilis peta strategis yang mana akan menjadi visi serta menentukan indikator dari penerbitan SBSN. Dalam instrumen keberhasilan penerbitan SBSN ini terdapat beberapa indikator yang secara umum sama dari tahun

ke tahun, berikut merupakan 10 indikator yang digunakan sebagai pengukur keberhasilan penerbitan SBSN:

- a. Pengelolaan pembiayaan melalui SBSN yang optimal dan produktif dalam mendukung Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Dalam hal ini diukur dengan Indeks efektivitas pembiayaan proyek pemerintah melalui SBSN, Indeks pemenuhan target pembiayaan melalui SBSN dengan biaya dan risiko yang terkendali serta Persentase penyediaan *underlying asset* penerbitan SBSN
- b. Penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien. Untuk indikator ini diukur melalui Indeks kepuasan pengguna layanan, serta Tingkat kepatuhan dealer utama dan mitra distribusi.
- c. Perencanaan dan perumusan kebijakan pengelolaan SBSN yang berkualitas. Indikator ini diukur melalui Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi pengelolaan SUN, serta *Devisi/spread benchmark harga/yield* dalam lelang SBSN dengan harga pasar yang wajar.
- d. Pengelolaan portofolio SBSN yang optimal dengan biaya dan risiko yang terkendali. Indikator ini diukur dengan Indeks efektivitas pengelolaan portofolio SBSN.
- e. Pengembangan pasar keuangan dan basis investor SBSN yang optimal. Indikator ini diukur melalui Indeks keberhasilan pendalaman pasar SBSN domestik.
- f. Kerjasama kelembagaan yang efektif dan ekspansif. Indikator ini diukur dengan Persentase pencapaian target kerjasama kelembagaan.
- g. Komunikasi publik yang efektif. Indikator ini dapat diukur dari Indeks efektivitas komunikasi publik.
- h. Penataan birokrasi dan pengendalian kualitas organisasi yang berkelanjutan dan bernilai tambah. Indikator ini diukur melalui Tingkat penerapan sistem pengendalian *intern* dan manajemen kinerja, Persentase pencapaian

target penyelesaian arahan pimpinan, serta Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti.

- i. Organisasi dan SDM yang optimal. Indikator ini diukur melalui Indeks pengembangan kompetensi pegawai.
- j. Pengelolaan keuangan yang optimal. Indikator ini dapat diukur melalui Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

E. Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Menurut Ekonomi Islam

Islam sebagai sebuah agama memiliki sistem nilai yang perlu diterapkan, tidak terkecuali dalam kegiatan ekonomi. Pengaplikasian nilai Islam dalam aktivitas ekonomi pada periode ekonomi modern sudah dimulai sejak empat dekade belakang yang dikenal dengan sistem ekonomi Islam. Di awal perkembangannya, pengaplikasian nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi lebih banyak diterapkan di sektor keuangan. Seiring berjalannya waktu, implementasi perspektif Islam dalam praktik ekonomi sudah hampir menyeluruh pada semua bidang ekonomi, termasuk ekonomi pembangunan.⁷⁰

Ekonomi pembangunan Islam harus memiliki prinsip dan dasar yang sama dengan ekonomi Islam secara umum. Perbedaan mendasar dari ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terdapat pada paradigma yang melandasi kedua pendekatan ekonomi ini. Ekonomi Islam sesuai namanya dilandasi oleh paradigma Islam, sementara ekonomi konvensional dikembangkan lebih dengan menggunakan pendekatan sekuler. Perbedaan paradigma inilah yang pada akhirnya akan mempengaruhi struktur dan turunan dari masing-masing pendekatan.

Islam memandang pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kedewasaan manusia, dimana kemajuan material saat ini tidak dapat dihindari dan harus didukung oleh kekuatan kedewasaan spiritual. Beberapa tujuan penting yang harus diprioritaskan, seperti: pertumbuhan yang disertai dengan tenaga

⁷⁰ Mahri et al., *Ekonomi Pembangunan Islam*, 11.

kerja yang handal dan terampil di bidangnya, akan menjadi kualitas tersendiri yang memiliki hasil kerja yang berkualitas, stabilitas ekonomi, keadilan distributif dan kepedulian terhadap alam.

Adapun prinsip pembangunan ekonomi perspektif Islam antara lain:⁷¹

- a. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material.
- b. Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya.
- c. Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan dan Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah kepada ummat manusia.

Terdapat empat aksioma yang sering dikemukakan oleh Naqvi dan Nurzaman sebagai prinsip dasar ilmu ekonomi Islam dan juga yang menlandasi konsep pembangunan islam, yaitu: Keesaan (*Tauhid*), *Equilibrium (Al-'Adl wa Al-Ihsan)*, *Free Will (Ikhtiar)*, dan *Responsibility (Fard)*.⁷² Keempat aksioma ini sejalan dengan nilai-nilai dasar ekonomi syariah yang dikemukakan oleh Bank Indonesia dari hasil diskusi bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana keempat nilai tersebut meliputi: Kepemilikan, Pertumbuhan yang seimbang, Berusaha dengan berkeadilan, serta Bekerja sama dalam kebaikan. Berikut adalah penjelasan terkait keempat aksioma atau nilai tersebut yang dirangkum dari Nurzaman dan Bank Indonesia:⁷³

a. Keesaan (*Tauhid*)

Sudah menjadi kewajiban setiap umat muslim wajib meyakini keesaan Allah Swt. Kewajiban menyadari bahwa

⁷¹ Almizan, "Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 220.

⁷² Syed Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (yogyakarta: pustaka pelajar, 2003), 35.

⁷³ Mahri et al., *Ekonomi Pembangunan Islam*, 12.

semua hanya milik Allah Swt. adalah mutlak atas semua kepemilikan harta manusia. Artinya, kepemilikan manusia terhadap hartanya hanyalah bersifat relatif atau sebagai seorang manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola harta tersebut dan membelanjakan harta tersebut di jalan Allah Swt. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

..... إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

Artinya:

“...*Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*” (Q.S. Fatir [35]:1)

Dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dijelaskan bahwa ayat ini memuji Allah yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya dan menjadikan malaikat-malaikat yang memiliki beragam sayap sebagai rasul kepada para hamba-Nya. Jika Allah berkehendak untuk menurunkan karunia-Nya, maka tak ada yang dapat menghalangi-Nya. Sebaliknya, tak seorang pun dapat mendatangkannya jika Allah tidak menghendaki hal itu. Allah berfirman kepada manusia untuk senantiasa mengingat berbagai nikmat yang dilimpahkan-Nya. Sebab, tak ada Pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki. Dan Allah tidak memerlukan bantuan dari siapa pun dalam segala tindakan-Nya, Jika Dia berkehendak memberi tambahan, Dia berhak memberikan tambahan pada ciptaan-Nya. Tak ada yang dapat menundukkan-Nya karena kekuasaan-Nya atas segala sesuatu teramat besar.⁷⁴

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

⁷⁴ Syahid Sayyid Quth, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 200AD), 423.

Artinya:

“Ingatlah, Sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, Sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya). (Q.S. Yunus [10]:55)

Dalam tafsir Al-Misbah ayat ini menerangkan bahwa hendaknya manusia mengetahui bahwa Allah adalah Pemilik dan Pengendali semua yang ada di langit dan di bumi, dan bahwa janji-Nya adalah benar hingga tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan-Nya dan menghindar dari balasan-Nya. Tetapi mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka tidak mengetahuinya dengan sebenarnya.⁷⁵

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 195)

Dalam tafsir Al-Misbah ayat ini menjelaskan bahwa sebagaimana berjihad bisa dilakukan dengan pengorbanan jiwa, ia juga dapat disalurkan lewat pengorbanan harta. Maka infakkanlah harta kalian untuk menyiapkan peperangan. Ketahuilah, memerangi mereka itu merupakan perang di jalan Allah. Janganlah kalian berpangku tangan dan dermakanlah harta kalian untuk peperangan itu. Sebab, dengan berpangku tangan dan kikir mendermakan harta, berarti kalian rela dikuasai dan dihina musuh. Itu sama artinya kalian menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Maka lakukanlah

⁷⁵ Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*,

kewajiban kalian seserius dan sebaik mungkin. Sesungguhnya Allah menyukai hamba-Nya yang melakukan suatu pekerjaan secara optimal.⁷⁶

Ayat ayat diatas menjelaskan bahwa aksioma ini menyiratkan bahwa spirit dari ekonomi pembangunan Islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat duniawi tetapi juga untuk mencapai kepentingan yang bersifat *ukhrawi*. Segala yang dilakukan atas dasar kepercayaan kepada Allah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa yang dicapai oleh pembangunan Islam tidak hanya yang bersifat fisik/material tetapi juga spiritual.

b. *Equilibrium (Al-'Adl wa Al-Ihsan)*

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. di muka bumi tidak lain adalah untuk menjadi *rahmatan lil 'alamin* (Q.S. al-Ankabut [29]: 51), yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk alam. *Al-'Adl* merujuk kepada hubungan timbal balik antar-manusia dimana seseorang harus berlaku adil dan tidak merugikan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Sementara *Ihsan* merujuk kepada tanggung jawab individu dan masyarakat untuk memperhatikan orang-orang yang memiliki keterbatasan untuk memperoleh suatu manfaat. Kedua faktor ini diharapkan menjadi tujuan untuk mencapai *rahmatan lil 'alamin* serta dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan kesetaraan sosial yang menyeluruh.

Aksioma kedua ini mengajarkan untuk ekonomi pembangunan Islam tidak hanya mengarahkan pembangunan yang bersifat individual, tetapi juga kelompok, pembangunan yang tidak menciptakan ketimpangan dan menjunjung tinggi keadilan. Selain itu, aksioma ini juga menyiratkan bahwa ekonomi pembangunan Islam memprioritaskan pembangunan yang bersifat *daruriyat*, yaitu pembangunan yang pro terhadap kaum lemah, kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan. Aksioma ini juga mengarahkan agar dimensi

⁷⁶ *Ibid.*, 228.

pembangunan di dalam Islam lebih komprehensif yang tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga makhluk lain dan lingkungan sekitar.

c. Free Will (Ikhtiar)

Allah Swt. menciptakan manusia dengan memiliki nafsu atau kehendak untuk melakukan suatu usaha yang diikuti dengan pemberian akal untuk berpikir. Manusia dituntut untuk menggunakan daya nalar mereka untuk membuat keputusan atas kehendak yang ada dalam diri mereka. Hal inilah yang memuliakan manusia dari makhluk lain di atas permukaan bumi dan menjadikan mereka sebagai khalifah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S al-Jumua [62]: 10)

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat diatas menerangkan bahwa apabila kalian telah melakukan salat, maka bertebaranlah untuk berbagai kepentingan. Carilah karunia Allah dan berzikirlah kepada-Nya banyak-banyak, dalam hati maupun dan dengan ucapan. Mudah-mudahan kalian memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat.⁷⁷

... وَلَا تَرُّوْا وَازِرَةً وَّزَرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٧٤﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن دُونِ الْأَرْضِ

⁷⁷ Ibid., 232.

وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ
سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya:

“... dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.”. dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-An’am [6]: 164-165)

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat ini memnerangkan bahwa Allahlah yang menjadikan kita sebagai pengganti umat-umat yang lalu dalam mengembangkan alam. Dia meninggikan derajat kesempurnaan materi dan maknawi sebagian kalian di atas yang lain, karena menempuh sebab-sebabnya? Itu semua agar Dia menguji kalian atas nikmat yang telah dikaruniakan-Nya, apakah kalian bersyukur atau tidak. Juga atas hukum-hukum syariat, apakah kalian laksanakan atau tidak. Allah Maha cepat hukumannya terhadap orang-orang yang melanggar. Sebab, hukuman-Nya pasti akan datang. Segala yang akan datang adalah dekat. Sesungguhnya ampunan-Nya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang bertobat dan berbuat baik sangat besar. Kasih sayang-Nya kepada mereka amat luas.⁷⁸

Aksioma ketiga (*free will*) menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan harus ada sebuah proses pengendalian yang dilakukan oleh manusia selaku objek sekaligus subjek dari pembangunan. Di dalam prinsip ekonomi Islam

⁷⁸ *Ibid.*, 372.

kelangkaan (*scarcity*) bukanlah masalah utama, tetapi yang menjadi masalah adalah penyebab dari kelangkaan tersebut. Kelangkaan dalam ekonomi Islam dapat dibagi dua, yaitu kelangkaan *absolut* dan kelangkaan *relatif*. Kelangkaan relatif ini mempercayai bahwa pada dasarnya apa yang diciptakan di dunia ini adalah cukup, tetapi yang membuatnya menjadi langka adalah ketamakan manusia. Selain karena ketamakan, kelangkaan juga terjadi karena keterbatasan manusia dalam mengeksplorasi dan mendistribusikan sumber daya secara adil terhadap manusia lainnya dan dalam periode waktu. Pengendalian pembangunan yang memperhatikan aspek inilah yang sering disebut sebagai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

d. Responsibility (Fard)

Aksioma ini menjelaskan tanggung jawab manusia terhadap Allah Swt., terhadap dirinya sendiri, serta terhadap orang lain, serta masyarakat yang pada akhirnya melahirkan satu tujuan, yaitu untuk membantu sesama manusia karena Allah yang dapat meningkatkan derajat keimanan.

Aksioma yang keempat menyiratkan bahwa pembangunan dalam Islam merupakan sebuah bentuk dari tanggung jawab manusia selaku subjek dan objek dari pembangunan. Dimana tanggung jawab ini bukan hanya sebatas untuk menjamin keberlangsungan hidupnya, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup bermasyarakat yang merupakan wujud penghambaan diri manusia sebagai khalifah di muka bumi. Aksioma ini mendorong agar pembangunan yang dilakukan tidak bersifat individualis dan memperhatikan kepentingan bersama dan mengikuti arahan yang diperintahkan oleh Allah Swt.

2. Teori dan Konsep Pembangunan Ekonomi Islam

a. Konsep Pembangunan Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun sering disebut sebagai bapak ekonomi Islam karena sumbangsih pemikirannya yang sangat besar terhadap

fondasi ekonomi Islam. Secara keilmuan, Ibnu Khaldun tidak hanya menguasai satu basis ilmu, tetapi juga memiliki kekayaan intelektual di berbagai bidang lainnya. Hal ini juga lah yang membuat pemikirannya sangat komprehensif dan universal, termasuk pemikiran pada bidang ekonomi pembangunan. Basis keilmuan Ibnu Khaldun tidak hanya terbentuk dari aspek teoretis seorang intelektual melainkan juga dari pengalamannya yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu konsep-konsep yang dikemukakan Ibnu Khaldun masih sangat kontekstual.⁷⁹

Secara umum model Ibnu Khaldun ini tertuang dalam “*eight wise principles*” atau yang juga dikenal dengan kalimat *hikammiyah*. Kalimat *hikammiyah* ini dapat dimodelkan matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$G = f(S, N, j \text{ dan } g)$$

Dimana

G : Negara (*the state*)

S : Institusi (*institutions*)

N : Sumber Daya Insani (*human beings*)

W : Kekayaan (*wealth*)

j : Keadilan (*justice*)

g : Pembangunan (*development*)

Berikut merupakan bagaimana pengaruh satu faktor terhadap faktor yang lainnya.⁸⁰

1) Negara (*the state*)

Dalam ajaran Islam, tugas pokok negara dalam bidang ekonomi adalah menghapus kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, memberikan kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran. Di dalam Islam, keterlibatan pemerintah dalam perekonomian cukup besar. Hal ini dapat kita ketahui

⁷⁹ Mahri et al., *Ekonomi Pembangunan Islam*, 119.

⁸⁰ *Ibid.*, 121.

dari sejarah pemerintahan Rasulullah dan juga era khalifah. Pada masa itu pemerintah terlibat dalam semua ruang lingkup kehidupan termasuk perekonomian. Konsep negara yang digagas oleh Ibnu Khaldun adalah sebuah negara yang menjamin berlakunya syariah dan berfungsi sebagai instrumen bagi pembangunan manusia dan kesejahteraannya.

Menurut Umer Chapra, kekuasaan negara dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

- a) Kekuasaan alamiah atau normal (*tabi'i*), yakni yang membolehkan setiap orang memuaskan kepentingan pribadinya dan kesenangan hawa nafsu atau disebut juga dengan *laissez faire*.
- b) Kekuasaan politik rasional (*siyash aqliyah*) yang membolehkan setiap orang untuk memenuhi kepentingan pribadi/duniawi untuk mencegah kejahatan sesuai dengan prinsip-prinsip rasional atau disebut juga dengan welfare state sekuler.
- c) Kekuasaan berdasarkan moral (*siyash diniyyah* atau *khalifah*), yaitu yang memungkinkan setiap orang untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan syariah disebut juga dengan welfare state islami atau khilafah.

2) Institusi (*institutions*)

Institusi atau yang disebut juga syariah membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan perasaan kebersamaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan, keadilan, saling pengertian, kerja sama, kedamaian, dan keharmonisan sosial serta mengontrol tingkah laku yang dapat membahayakan masyarakat.

Syariah dapat menggunakan pengaruh moderatnya terhadap penggunaan sumber daya sehingga dengan demikian syariah dapat memberikan kontribusi terhadap keseimbangan sumber daya. Syariah mengacu pada nilai-

nilai dan lembaga atau aturan perilaku yang membuat masyarakat bersedia untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap sesama dan mencegah perilaku sosial yang menyimpang. Aturan ini bisa berbentuk formal maupun informal, tertulis atau tidak tertulis.⁸¹

3) Sumber Daya Insani (*human beings*)

Maju dan mundurnya suatu peradaban sangat ditentukan oleh kesejahteraan maupun kesengsaraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam analisisnya Ibnu Khaldun sangat menitikberatkan pada peran manusia. Sejalan dengan hal itu, kesejahteraan dan kesengsaraan masyarakat tidak hanya bergantung pada variabel-variabel ekonomi, tetapi juga dipengaruhi beberapa faktor lain yang melalui proses sebab akibat dalam waktu yang panjang. Manusia memiliki peranan penting dalam dinamika peradaban.⁸²

Manusia adalah tujuan dan alat pembangunan. Sebagai tujuan pembangunan, kesejahteraan ditujukan bagi manusia. Ketika kesejahteraan telah terpenuhi maka manusia akan dapat bekerja secara efektif dan kreatif. Sedangkan sebagai alat pembangunan, manusia merupakan subjeknya yang bekerja untuk membangun. Manusia adalah input, manusia membentuk pemerintahan, keluarga, dan masyarakat.

Besar kecilnya potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusianya. Dengan demikian pembangunan sumber daya insani haruslah mendapatkan perhatian, karena pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Selain itu pengeluaran sosial juga memberikan manfaat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Pengaruh sumber daya manusia terhadap tingkat kemiskinan tampak lebih besar

⁸¹ *Ibid.*, 122.

⁸² *Ibid.*, 123.

daripada pengaruh pengeluaran sosial terhadap tingkat kemiskinan.

4) Kekayaan (*wealth*)

Ibnu Khaldun menekankan peran investasi seraya menyatakan “*Dan ketahuilah bahwa kekayaan tidak tumbuh manakala ditimbun dan disimpan*”. Ia akan tumbuh dan berkembang manakala dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat, untuk diberikan kepada yang berhak, dan menghapuskan kesulitan. Faktor-faktor yang menjadi katalisator adalah laju pajak yang rendah, keamanan kehidupan dan hak milik, serta lingkungan fisik yang sehat.

Peningkatan dalam pendapatan akan memberikan kontribusi pada peningkatan dalam penerimaan pajak dan memungkinkan pemerintah membelanjakan lebih besar untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Hal ini akan memberikan peluang-peluang ekonomi dan pembangunan semakin berkembang.

Sebaliknya, penurunan pendapatan akan menimbulkan kemerosotan di dalam penerimaan pajak, dan tidak dapat lagi mencukupi belanja pemerintah. Negara akan cenderung memaksakan pajak yang lebih tinggi dan juga akan mencoba mendapatkan kontrol yang lebih besar terhadap sumber-sumber kekayaan. Ketika pendapatan merosot maka penerimaan pajak juga merosot. Negara tidak akan mampu menghidupi usaha-usaha pembangunan dan kesejahteraan. Kemudian pembangunan akan merosot semakin dalam dengan kekuatan-kekuatan menghancurkan yang bergerak cepat hingga akhirnya meruntuhkan dinasti yang berkuasa.

5) Pembangunan (*development*) dan Keadilan (*justice*)

Jika manusia menjadi pusat analisis, maka pembangunan dan keadilan menjadi dua pengait penting dalam mata rantai sebab akibat. Pembangunan sangat penting karena kecenderungan normal dalam masyarakat tidak ingin mandek. Mereka harus terus maju atau mereka akan mengalami kemunduran.

Pembangunan di dalam model Ibnu Khaldun tidak hanya mengacu kepada pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan meliputi semua aspek pembangunan manusia sehingga masing-masing variabel memperkaya variabel lain dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan atau kebahagiaan hakiki manusia.⁸³

Pembangunan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa unsur keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah tidak dipandang dalam arti ekonomi yang sempit, tetapi dalam arti yang lebih komprehensif. Keadilan dalam semua sektor kehidupan manusia. Selanjutnya keadilan yang holistik komprehensif ini tidak akan dapat dicapai tanpa masyarakat yang peduli. Keadilan melalui persaudaraan dan persamaan sosial, menjamin keamanan kehidupan, hak-hak milik dan penghormatan kepada martabat orang lain, pemenuhan secara jujur kewajiban politik dan sosio ekonomi, upah yang adil bagi siapa saja yang telah bekerja serta pencegahan kezaliman kepada siapapun dalam bentuk apapun.

b. Konsep Pembangunan As-Syatibi

Konsep pembangunan yang digagas oleh As-Syatibi merupakan implementasi konsep *Maqoshid Syariah* yang mana merupakan tujuan dari ekonomi islam. Dalam model ini ekonomi pembangunan diadaptasi dari komponen tujuan pembangunan. Hal ini berbeda dengan teori sebelumnya yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun yang lebih cenderung menggunakan pendekatan elemen dari pembangunan yang mempengaruhi berjalannya suatu sistem dalam masyarakat. Yang mana analisis pembangunan didasarkan pada apa yang ingin dicapai oleh pembangunan.

Dua Ilmuwan yang teridentifikasi dalam menyokong model dengan pendekatan ini ialah Al-Ghazali dan Umer Chapra. Dalam model ini yang menjadi pusat analisis pembangunan adalah kesejahteraan manusia (*human beings*) dengan fokus untuk melindungi lima aspek maqashid syariah

⁸³ *Ibid.*, 124.

adapun lima aspek tersebut adalah:⁸⁴ Agama (*Faith / Din*), Jiwa (*The Human Self / Nafs*), Akal (*Intelect / 'Aql*), Keturunan (*Posterity / Nasl*), Harta (*Wealth / Mal*).

Maqashid al-shariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syariah artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasyid syari'ah yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁸⁵

As-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategor hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambaNya.

- 1) *Al-maqasyid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
- 2) *Al-maqasyid al-hajjiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik.

⁸⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat hukum Islam & maqashid syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 58,

⁸⁵ *Ibid.*, 44.

- 3) *Al-maqasyid at-tahsiniyat*, secara bahasa yang berarti penyempurnaan, dimana kategori ini dikerjakan setelah 2 (dua) kategori sebelumnya sudah terpenuhi.

F. Kerangka Berpikir

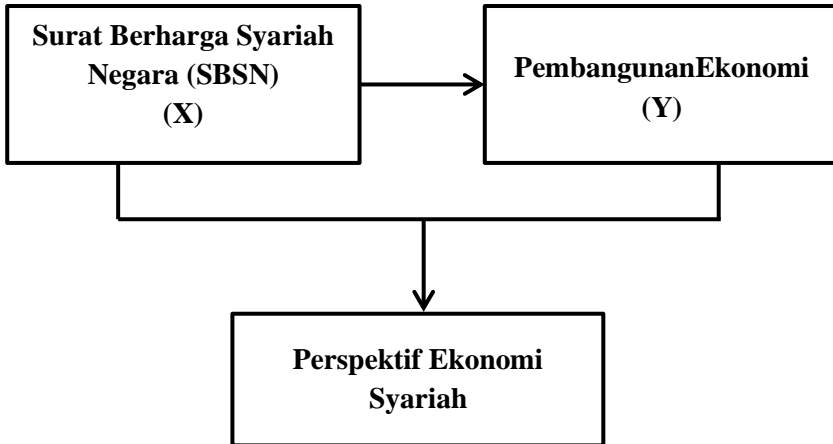
Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Kriteria utama dari kerangka berfikir adalah alur-alur pikiran yang logis dari berbagai teori yang telah dideskripsikan yang selanjutnya di analisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan hubungan antar variabel yang diteliti untuk merumuskan hipotesis.⁸⁶

Kerangka Pemikiran yang disusun penulis terdiri dari variabel independen dan dependen. Variabel independen terdiri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sedangkan variabel dependen yaitu pembangunan ekonomi yang akan dikaji berdasarkan perspektif Ekonomi Islam.

1. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (X)
2. Pembangunan Ekonomi (Y)

Untuk memudahkan penelitian yang dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimanakah pengaruh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap Pembangunan Ekonomi kemudian dikaitkan dengan perspektif islam didalamnya . Berikut ini digambarkan suatu kerangka pemikiran secara skematis sebagai berikut:

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D*, Cetakan Ke- 20 (Bandung: Alfabeta, 2014), 89.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi yang dijadikan tujuan disetiap negara sebagai salah satu barometer pengukuran kesejahteraan serta kemajuan suatu negara, dimana banyak faktor yang mempengaruhi serta instrumen yang diperlukan. Salah satu indikator dari pembangunan ekonomi salah satunya adalah sumber daya modal, modal ini digunakan dalam proses pembangunan. APBN sebagai sumber pembiayaan yang digunakan dalam pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pembiayaan pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Data menyebutkan bahwa kondisi APBN sepuluh tahun terakhir selalu mengalami defisit anggaran dimana pengeluaran lebih besar dari pada pemasukan, dimana kondisi ini mengharuskan pemerintah menghimpun dana lain guna menutupi kekurangan tersebut. Oleh karenanya pemerintah melakukan belanja anggaran, salah satu kebijakan fiskal pemerintah ialah dengan menerbitkan Srat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Islam sendiri memandang pembangunan ekonomi sebagai sesuatu yang kompleks dimana akan banyak hal yang perlu diperhatikan baik dalam proses pembangunan maupun tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan tersebut, serta salah satunya proses akumulasi modal yang akan digunakan untuk pembangunan.

G. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁸⁷ Maka dengan mengacu latar belakang masalah, serta kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan adalah:

1. Pengaruh Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap pembangunan ekonomi Indonesia Tahun 2012-2021.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagaimana fungsinya dalam Undang-Undang yakni digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen belanja modal yang digunakan untuk menutupi devisa APBN. Dimana fungsinya sangat penting bagi pemerintah guna sebagai alternatif pembiayaan untuk melakukan pembangunan negara, seiring berjalannya waktu instrumen SBSN mengalami perkembangan yang sangat pesat, dengan adanya model dan jenis dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang mana memungkinkan untuk membiayai proyek secara langsung, hal ini merupakan kemajuan dimana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat menyentuh langsung serta berpengaruh terhadap pembangunan negara, dimana dengan adanya proyek proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) akan meningkatkan pendapatan rakyat serta mendukung kemajuan perekonomian warga yang berhilir pada kemajuan negara. Hal ini juga sejalan dengan teori Harrod-Domar dimana ia mengatakan bahwa akumulasi modal dan investasi akan menciptakan pendapatan dan menaikkan kapasitas produksi nasional serta laju pertumbuhan yang seimbang tergantung pada besarnya angka pengganda (*multiplier*) dan tingkat produktivitas investasi yang baru.⁸⁸

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Derry Fahrian dan Chenny Seftaria pada tahun 2016 yang berjudul

⁸⁷ *Ibid.*, 97.

⁸⁸ Mulyani, *Ekonomi Pembangunan*, 319.

“Pengaruh Lelang Sukuk Terhadap Perekonomian Indonesia”, hasil penelitiannya mendapatkan bahwa variabel SBSN dan GDP mempengaruhi perubahan GDP . GDP dalam jangka pendek dipengaruhi oleh GDP secara positif dan SBSN secara negatif. Artinya dalam jangka pendek, kenaikan jumlah SBSN yang beredar pada suatu periode akan menurunkan jumlah GDP di periode berikutnya. Dalam jangka panjang variabel GDP dipengaruhi oleh variabel GDP dan SBSN secara positif yang artinya bahwa kenaikan dari SBSN akan meningkatkan GDP dalam jangka panjang.⁸⁹

Penelitian selanjutnya oleh Khavid Normasyhuri, Budimansyah dan Eko Triadi juga menyebutkan dalam penelitiannya pada tahun 2022 yang berjudul “Dampak Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) Dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Era Pandemi Covid-19 ; Tinjauan Ekonomi Islam”, hasil Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memiliki pengaruh positif dan signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia era pandemi covid19. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) juga mempunyai fungsi strategis yaitu memperluas basis pasar keuangan syariah, menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan tiap tahun anggaran.⁹⁰

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

H1 = Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia tahun 2012-2021

⁸⁹ Fahrian and Seftarita, “Pengaruh Lelang Sukuk Terhadap Perekonomian Indonesia,” 446.

⁹⁰ Normasyhuri, Budimansyah, and ..., “... Surat Utang Negara (SUN) Dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Ekonomi Islam,” 688–98.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arsyad, Azhar. *Media Pembelajaran, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Aulia, Fauzian Rahman. "Aspek Obligasi Dan Sukuk." *Jurnal Tinjauan Atas Sukuk Ijarah* 12, no. 2 (2014).
- Bannock, Graham, R. E. Baxter, and Evan Davis. *A Dictionary of Economics*. Inggris: Penguin Books Ltd, 2004.
- Basuki, Agus Tri, and Nano Prawoto. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis: Dilengkapi Dengan Aplikasi SPSS & Eviews*. Jakarta: Rajawali pers, 2016.
- Ghozali, Imam. *Plikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23, Cet. VIII*. Semarang: Penerbit UNDIP, 2016.
- Hasan, Muhammad, and Muhammad Aziz. *PEMBANGUNAN EKONOMI & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Edisi Dua. Makassar: CV. Nur Lina, 2018.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita, 2011.
- Kuncoro, Murdijat. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006.
- Mahri, A. Jajang W., Cupian, M. Nur Rianto Arif, Tika Arundina, Tika Widiastuti, Faisul Mubarok, Muhamad Fajri, and Aas Nurasyiah. *Ekonomi Pembangunan Islam*, 2021.
- Manurung, Mandala. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Raharja Prathama, 2001.
- Mulyani, Endang. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UNY Press, 2017.
- . *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UNY Press, 2017.
- Naqvi, Syed Nawab Haidar. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*.

yogyakarta: pustaka pelajar, 2003.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali pers, 2011.

Quth, Sayyid. *Fi Zhahilil-Qur'an*. Volume III. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Quth, Syahid Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 200AD.

S, Burhanuddin. *Hukum Surat Berharga Syariah Negara Dan Pengaturannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Shihab, M. Quraish. *TAFSIR AL-MISBAH: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume V. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gedung Agung, n.d.

Siahaan, Santi.r, Elvis.F Purba, and Ridhon MB Simangungson. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2001.

Siamat, Dahlan. *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara)*. 2nd ed. Jakarta, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D, Cetakan Ke- 20*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makro Ekonomi. Cetakan Keenam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

T Tikson, Deddy. *Keterbelakangan & Ketergantungan: Teori Pembangunan Di Indonesia, Malaysia, Dan Thailand*. Makassar: Innawa, 2005.

Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2006.

Jurnal dan Publikasi

- Almizan. “Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2016): 203–22.
- Anik, Anik, dan Iin Emy Prastiwi. “Pengembangan Instrumen Sukuk Dalam Medukung Pembangunan Infrastruktur.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 03 (2017): 173.
- Ardi, Muhammad. “Pengaruh Sukuk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *Iqtishaduna* 9, no. 1 (2018): 85–97.
- Aulia, Fauzian Rahman. “Aspek Obligasi Dan Sukuk.” *Jurnal Tinjauan Atas Sukuk Ijarah* 12, no. 2 (2014).
- Aziz, Abdul. “Manajemen Investasi.” *Jurnal Akuntansi* 8 NO. 2 (2010).
- Datuk, Bahril. “Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah untuk Pertumbuhan Ekonomi.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol. 14 No (2014).
- Fahrian, Derry, dan Chenny Seftarita. “Pengaruh Lelang Sukuk Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah* 1, no. 2 (2016): 446–54.
- “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002,” n.d.
- Hariyanto, Eri. “Efektivitas Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN.” *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2017): 79–98.
- Latifah, Siti. “Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 421.
- Maula Nasrifah. “Sukuk (Obligasi Syariah) dalam Perspektif Keuangan Islam.” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2
- Muliaman, Dr., dan D. Haddad. “*Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016*,” 2016.

Nopijantoro, Wurjanto. “Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik Dalam Pembiayaan Infrastruktur.” *Substansi* 1, no. 2 (2017): 1–17.

Normasyhuri, K, B Budimansyah, dan ... “... Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi* ... 8, no. 01 (2022): 688–98.

Riduan, Adi. “Analisis Pengaruh Surat Berharga Syariah Negara Terhadap Pembangunan Ekonomi Tahun 2015-2018 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2019.

Ryandini, Tya. “Pengaruh Dana Investasi Melalui Instrumen SUN dan SBSN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2014): 73–84.

Sutedi, Adrian. “Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk.” *Jurnal Akuntansi* Volume 9, no. 4 (2006).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. “NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA,” no. 1 (2008): 282.

Wijaya, Reza Henning. “Investasi Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi: Optimasi Peran Sukuk Sebagai Penunjang Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 20, no. 1 (2021): 54.

Yuliarti, Syamsul Amar, dan Idris. “ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI SWASTA DI INDONESIA Oleh: Yuliarti, Syamsul Amar, Idris,” no. 3 (2013): 1–23.

Website

Bank Indonesia. “*Laporan Ekonomi & Keuangan Syariah*”.
www.bi.go.id

Badan Pusat Statistik. *“Indonesia Dalam Angka 2012-2021”*.
www.bps.go.id

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian
Keuangan. *“Laporan Tahunan DJPPR- Kementerian
Keuangan”*. www.djppr.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan. *“Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012-2021”*.
www.kemenkeu.go.id



